



LAPORAN KINERJA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TPPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

MENGELOLA TANTANGAN UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN





MENGELOLA TANTANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Disusun oleh:

**Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD)
Kabupaten Bangkalan**



**TPPD Kab Bangkalan,
Desember Tahun 2021**



Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin-Nya lah laporan ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2021 ini menjadi lebih dari sebuah kewajiban. Laporan ini diniatkan untuk mendokumentasikan pelajaran-pelajaran yang kami, TPPD, petik selama ini. Sebuah bahan evaluasi-refleksi hasil dari pembelajaran bersama menangani berbagai program/proyek atau kegiatan beserta masalah dan tantangannya pada sepanjang tahun ketiga (2021) TPPD bekerja.

Kami coba fokus pada “mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan” karena saat ini kita masih menghadapi banyak persoalan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Proses evaluasi dari intervensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam rangka **mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan** selama setahun ini kami petakan menjadi 3 tahap: 1. Intervensi *need assessment* TPPD dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan; 2. Intervensi Pemkab Bangkalan dalam penanganan covid-19; 3. Intervensi percepatan pembangunan daerah berbasis pariwisata dan industrialisasi di era new normal.

Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya, berupa kerja sama, kritik, dukungan, hingga harapan dan doanya selama ini.

Laporan ini bersifat mandatori karena secara legal-formal memang diperintahkan oleh dasar hukum pembentukan TPPD, yakni: Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/279/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/12/Kpts/433.013/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Seperti diketahui bahwa upaya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar yang datang bersamaan, yakni pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan



perkembangan teknologi. Ketiga tantangan itu berisiko memperlebar jurang ketimpangan.

“Mengelola Tantangan untuk Pembangunan Berkelanjutan”

mewakili semangat kami menapaki proses tahun 2021 ini. Ia mengekspresikan sebagian besar misi kami untuk terus loyal bekerja membantu Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tahun 2020 kita pegang erat pesan Bupati untuk kolaborasi antar sektor guna mengelola tantangan berbagai persoalan di Bangkalan. Tahun 2021 TPPD sengaja lebih fokus pada mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan di era new normal. Kami berkeyakinan bahwa ketika kolaborasi bisa kita ciptakan maka akan dapat dilakukan konvergensi untuk mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan di kabupaten Bangkalan.

Penyusunan laporan ini menerapkan mekanisme *bottom up* sebagaimana arahan Peraturan Bupati. Bahan-bahan dihimpun dari bawah, dari masing-masing bidang TPPD. Setelah proses penyusunan selesai, Laporan ini segera kita sampaikan kepada Bapak Bupati.

Semoga Allah selalu memberkati niat hingga langkah kita semua: kemarin, kini, dan esok. Amiin.

Bangkalan, 15 Desember 2021

Ttd

Drs. Ec. Muh Syarif, MSi
Ketua TPPD Kabupaten Bangkalan



HALAMAN DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Platform Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.....	1
1.2. Profil TPPD Bangkalan.....	3
1.3. Dasar Hukum.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
1.5. Metodologi.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
2.1. Wilayah Kabupaten Bangkalan.....	10
2.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	12
2.3. Pemerintahan.....	15
2.4. APBD.....	16
2.5. Penduduk.....	18
2.6. Ketenagakerjaan.....	19
2.7. Pendidikan.....	21
2.8. Kesehatan.....	22
2.9. Pembangunan Manusia.....	23
2.10. Pengeluaran Penduduk.....	24
2.11. Pendapatan Regional.....	26
2.12. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	27
2.13. Iklim Investasi.....	29



BAB III POTENSI DAN TANTANGAN.....	33
3.1. Potensi.....	33
3.2. Tantangan.....	43
 BAB IV MENGELOLA TANTANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	 47
4.1. Mengelola Tantangan Proses Pembangunan Daerah.....	47
4.2. Mengelola Tantangan Sinergitas pembangunan Daerah.....	51
4.2. Mengelola Tantangan Penanganan Covid 19.....	57
4.3. Mengelola Pembangunan Pariwisata dan Industri.....	61
 BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	 70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Rekomendasi	72
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75
LAMPIRAN.....	76



Tabel 1.1	Struktur Organisasi TPPD Bangkalan.....	4
Tabel 2.2	Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	15
Tabel 2.3	Realisasi APBD Bangkalan 2019 - 2020 (Miliar).....	17
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.....	18
Tabel 2.5	Statistik Ketenagakerjaan Bangkalan 2020.....	20
Tabel 2.5	Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.....	21
Tabel 2.6	Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangkalan, 2019-2020.....	22
Tabel 2.7	Tenaga Kesehatan di Bangkalan 2019-2020.....	22
Tabel 2.8	Indikator Penyusun IPM Kab Bangkalan, 2016–2020.....	24
Tabel 2.9	Pengeluaran Rumah Tangga, 2020.....	25
Tabel 2.10	Lama Proses Perijinan Kabupaten Bangkalan.....	32
Tabel 3.1	Potensi Produk Unggulan Industri Kecil Kab Bangkalan.....	34
Tabel 3.2	Potensi Komoditi Perdagangan dan Eksport Kabupaten Bangkalan.....	35
Tabel 3.3	Produksi Buah-buahan dan bunga melati (kuintal), 2019-2020.....	36
Tabel 3.4	Produksi Perkebunan di Kabupaten Bangkalan.....	38
Tabel 3.5	Produksi Perikanan (Tangkap Laut) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.....	39
Tabel 3.6	Produksi Perikanan (Budidaya) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.....	39
Tabel 3.7	Produksi Hasil Perikanan Kab Bangkalan Tahun 2018.....	39
Tabel 3.8	Potensi Pariwisata Kabupaten Bangkalan.....	40
Tabel 3.9	Potensi Pertambangan di Bangkalan.....	42



Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangkalan.....	11
Gambar 2.2	Komposisi SDM Pemkab Bangkalan, 2020.....	16
Gambar 2.3	Realisasi Belanja Daerah Kab Bangkalan 2020 (%)....	17
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk 4 Kab di Madura Tahun 2020...	19
Gambar 2.5	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020.....	20
Gambar 2.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur, Kabupaten Bangkalan Tahun 2019–2020.....	21
Gambar 2.7	IPM Kabupaten Bangkalan, 2016-2020.....	23
Gambar 2.8	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan di Kab Bangkalan.....	25
Gambar 2.9	PDRB Kab Bangkalan, 2020.....	26
Gambar 2.10	Peranan Sektor Ekonomi di Kab Bangkalan (%), 2020.....	27
Gambar 3.1	Produksi Padi, Jagung, Kedelai di Kabupaten Bangkalan (Ton), 2019 – 2020.....	36
Gambar 3.2	Populasi Ternak di Kabupaten Bangkalan (Ekor), 2020.....	37
Gambar 3.3	Populasi Unggas di Kabupaten Bangkalan (Ekor), 2020.....	37
Gambar 3.4	Jumlah Wisatawan Tahun 2018 – 2020.....	41



1.1. Platform Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan

Sejak dilantik pada tanggal 24 September 2018 Bupati R.Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Drs.H. Mohni, MM beserta jajaran birokrasinya langsung tancap gas mulai bergerak membangun Kabupaten Bangkalan. Langkah awalnya dimulai dari penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun. 19 isu strategis yang akan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Bangkalan ke depan, salah satu titik fokusnya, yakni pada sektor pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Karena keduanya merupakan point utama kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Bupati Ra Latif dalam proses menjalankan pemerintahannya terus membuka kontribusi ide, gagasan, dan masukan yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut membangun Bangkalan sesuai dengan visi misi Bupati, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memprioritaskan empat poin pembangunan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun anggaran 2021. Empat poin itu dirangkum dalam tema "pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan industri, pariwisata dan investasi didorong oleh penguatan SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik".

Empat prioritas pembangunan itu antara lain; pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan

konektivitas dan keterjangkauan wilayah dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan kesehatan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Perumusan empat prioritas pembangunan tersebut selain sesuai visi-misi pemerintah Bangkalan, juga berdasarkan hasil musyawarah baik di tingkat desa maupun kecamatan.

Perkembangan pembangunan di kabupaten Bangkalan dari tahun 2018-2021 cukup membanggakan. Salah satunya dari sebelumnya Bangkalan mempunyai 24 desa tertinggal maka sejak pertengahan 2020 status tersebut sudah tidak dimiliki Bangkalan. Meski status desa tertinggal sudah terangkat namun status desa Mandiri belum dimiliki Bangkalan. Untuk itu Bupati Bersama AKD (Asosiasi Kepala Desa) terus bersinergi membangun desa.

Bupati Ra Latif menyatakan bahwa untuk tahun 2021 bantuan program untuk desa tertinggal akan dihapus, bantuan dari pemerintah hanya akan diberikan kepada desa mandiri. Bupati menghimbau kepada desa untuk tidak berfikir bahwa desanya dinyatakan tertinggal dengan harapan untuk mendapatkan bantuan.

Banyak penghargaan yang telah diraih dari proses pembangunan yang ditangani Bupati. Inovasi di bidang pertanian berupa Tanam Jaring Bangkalan sejahterakan petani atau yang disingkat Taring Bang Jani sebagai salah satu Program unggulan Dinas Pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Bangkalan berhasil mengantarkan Kabupaten Bangkalan memperoleh Penghargaan berupa **Top 30 Kompetisi Pelayanan Publik (Kovablik) Tahun 2020** dari Gubernur Jawa Timur. Bupati Bangkalan R.Abdul Latif Amin Imron juga menerima Penghargaan **Top 30 Kovablik** yang secara langsung diserahkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA disaksikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Singhasari Resort, Batu pada hari Jumat, 13 November 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perangkat daerah tahun 2021, persentase pencapaian visi misi Kabupaten Bangkalan di tahun ke-3 ini

mencapai 69,58 persen. Diharapkan di tahun selanjutnya bisa mencapai angka 100 persen. Selain itu, tolok ukur lainnya adalah penilaian penataan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Bangkalan di bawah kepemimpinan Bupati Ra Latif selama tiga tahun berturut-turut Pemkab Bangkalan mampu menyajikan laporan keuangan dengan predikat tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejumlah prestasi dan penghargaan lainnya yang telah diraih Pemkab Bangkalan selain WTP yakni, penghargaan atas penyelesaian desa tertinggal tercepat se-Jawa Timur (2021), penghargaan sebagai Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri (2021), penghargaan predikat Pratama Kabupaten layak anak (2021), Penghargaan inseminasi buatan di bidang peternakan, penghargaan inovasi pertanian melalui Bangjani, serta penghargaan prestasi di bidang olahraga, dan lain-lain.

1.2. Profil TPPD Bangkalan

Pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan dirasakan belum optimal dibanding daerah lainnya, maka dirasa perlu Bupati melakukan langkah percepatan pembangunan. Salah satunya adalah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD). TPPD Bangkalan diharapkan dapat membantu kerja Bupati dan Wakil Bupati.

Mengingat pentingnya keberadaan TPPD bagi Bupati Bangkalan maka saat ini diposisikan langsung di bawah Bupati dan Wakil Bupati, namun bukan sebagai lembaga struktural lazimnya organisasi perangkat daerah (OPD). Dasar hukum pembentukannya adalah Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/279/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/12/Kpts/433.013/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa susunan keanggotaan TPPD sebagai berikut:

Tabel 1.1. Struktur Organisasi TPPD Bangkalan

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	R. Abdul Latif Amin Imron	Pengarah
	Drs. Mohni, MM	
	KH. Moh. Faisol Anwar	
2	Ir. Murdjito, MSc.Eng	Penanggung Jawab
3	a. Dr. Ec. Muh. Syarif, MSi	Ketua
	b. Drs. Setijabudhi, MM	Wakil Ketua
4	a. Dr. Akhmad Farid, S.Pi, MT	Sekretaris Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja
	b. Dr. Moh Dawud, M.Sos	Anggota
	c. Moh Ikhsan	Anggota
5	a. Dr. Bambang Hariyadi, SE,MSi. AK,CA,CfrA	Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	b. Drs. Moh Kamil, MPd	Anggota
	c. Norhadi, SPd, MM	Anggota
6	a. Dr. Syafi, SH, MH	Sekretaris Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik
	b. Machmud Fauzi, SH	Anggota
7	a. Dr. Ir. Abdul Aziz Jakfar, MT	Sekretaris Bidang Percepatan Pembangunan Daerah
	b. Machmud Fauzi, SH	Anggota
	c. Ir. H. Moh Taufan ZS, MM	Anggota

TPPD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bangkalan. TPPD dibentuk Bupati bukanlah lembaga struktural yang membawahi OPD, seperti Dinas, Badan, maupun Lembaga Teknis Daerah. Komposisi personalia TPPD berasal dari akademisi dan birokrat yang masih menjadi PNS aktif sebanyak 12 orang.

TPPD melakukan sinkronisasi antara visi dengan semua program. TPPD berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang membantu mengatasi masalah di masyarakat. TPPD juga berfungsi sebagai perwakilan untuk berhubungan dengan OPD. Fungsi TPPD di antaranya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas serta strategis dari Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan dan melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan perangkat daerah.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sejatinya memang perlu didukung oleh pertimbangan yang didasarkan pada hasil-hasil riset

sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran. Memang diakui secara umum, penggunaan hasil-hasil riset untuk penyusunan kebijakan di Indonesia dirasakan masih belum konsisten.

Seringkali, kebijakan publik disusun berdasarkan apa yang sedang populer dalam jangka pendek dan bukan berdasarkan kebutuhan jangka menengah dan panjang. Bahkan kebijakan publik cenderung ditetapkan hanya berdasarkan intuisi, opini, dan kepentingan sektoral.

Di sisi lain, banyak penelitian yang dilakukan baik oleh para akademisi, badan penelitian dan pengembangan pemerintah (Balitbangda dan Bappeda) maupun lembaga non-pemerintah, dianggap belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Penggunaan basis riset sering dianggap memakan waktu, sedangkan pembuat kebijakan biasanya membutuhkan data dan analisis yang cepat. Akibatnya banyak kebijakan yang dirasakan belum tepat sasaran dan tidak menghasilkan dampak optimal yang diharapkan. Padahal Kabupaten Bangkalan telah mempunyai berbagai aturan dan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat mengawal penyusunan kebijakan publik dan pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah.

Berbagai hasil riset dari akademisi telah banyak dihasilkan oleh universitas serta lembaga penelitian dan perencanaan daerah (Balitbangda dan Bappeda). Diharapkan TPPD akan mampu mendorong Perangkat Daerah sepenuhnya menggunakannya sebagai basis penyusunan setiap kebijakan.

Berbagai kondisi telah banyak menunjukkan akan pentingnya kebutuhan untuk menghubungkan dan membangun kolaborasi untuk konvergensi antara berbagai stakeholder dalam rangka proses pembangunan. TPPD dibentuk Bupati dengan tugas untuk memonitor program-program OPD di kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk memastikan program-program OPD sesuai dengan visi dan misi Bupati.

Tujuan pembentukan TPPD Kabupaten Bangkalan adalah untuk membantu Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan untuk percepatan

pembangunan seta untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai Visi Misi Kepala Daerah.

Tugas TPPD adalah:

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
4. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
5. Melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
6. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah,
7. Melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan Pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati, dan
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Manfaat yang diharapkan dari adanya TPPD adalah:

- Meningkatkan Fungsi kontrol internal Bupati
- Melengkapi fungsi kontrol DPRD
- Mendorong upaya peningkatan produktivitas, kualitas dan mentalitas PD

Kinerja TPPD Kabupaten Bangkalan di tahun pertama ditekankan pada upaya pembenahan dari dalam mulai *mindset*, *governance* dan lainnya Tahun kedua mencoba membangun kolaborasi antar stakeholder untuk konvergensi menuju satu tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun ketiga ini mencoba mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan di kabupaten Bangkalan.

1.3. Dasar Hukum

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN
6. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
8. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Bupati No 7 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja TPPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab I Pendahuluan berisi: Platform Bupati Bangkalan Periode 2018-2023, Profil TPPD, Dasar Hukum TPPD, Sistematika penulisan, dan Metodologi

Bab II : Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

Bab II Gambaran Umum berisi profil wilayah kabupaten Bangkalan

Bab III : Potensi dan Tantangan

Bab III berisi peta potensi dan tantangan dalam percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan

Bab IV : Mengelola Tantangan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Bab IV berisi upaya PemKab Bangkalan dalam mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi berisi kesimpulan dan rekomendasi TPPD dalam rangka percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan kinerja tahun 2022.

1.5. Metodologi

1. Metode Pengumpulan Data Kegiatan

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penyusunan laporan TPPD Kabupaten Bangkalan, utamanya dalam hal pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Menurut Burhan Bunglin (2011:118) Observasi adalah "kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya. Obyek pengamatannya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan TPPD.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data seluruh kegiatan TPPD.

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu metodologi kegiatan, peraturan perundang-undangan guna dijadikan

dasar dalam melakukan penilaian dari perbandingan dari kegiatan yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan.

Dengan kolaborasi metode tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai peran TPPD Kabupaten Bangkalan.

2. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2005:240) bahwa, "analisa merupakan bagian yang sangat penting didalam metode ilmiah, dengan analisis data dapat dicari arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

Tahap analisis data menurut Cholid Narbuko (2007:153), yakni:

1. Editing Editing merupakan proses pengolahan data mentah yang diperoleh saat penelitian dan dirangkum serta dipilih sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan.
2. Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para informan ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode pada masing-masing jawaban. Ada dua langkah di dalam melakukan koding, yaitu:
 - a. Menentukan kategori-kategori yang akan digunakan;
 - b. Mengalokasikan jawaban-jawaban informan pada kategori-kategori tersebut
3. Interpretasi Tahap akhir dalam menganalisis data adalah kegiatan interpretasi yakni untuk arti lebih luas dari jawaban yang diperoleh dari hasil penemuan yang sudah ada.



2.1. Wilayah Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian utara dan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura. Menurut data Bangkalan Dalam Angka Tahun 2021, luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.260,14 km², yang secara administratif Pemerintahan terbagi dalam: 18 (delapan belas) Kecamatan, 8 (delapan) kelurahan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 1 (satu) Pulau Karang Jamuang. Ditinjau dari letak astronomis, Kabupaten Bangkalan terletak antara 6° 51' – 7° 11' Lintang Selatan dan Antara 112° 40' – 113° 08' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Sampang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selat Madura;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selat Madura.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bangkalan



2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam kaitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat kegiatan nasional. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bangkalan memiliki kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

A. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

Merupakan Kawasan Strategis yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitar dan dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang. Kawasan ini ditentukan berdasarkan potensi yang ada, serta memiliki aglomerasi terhadap pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, dengan pertimbangan dapat memberikan dampak perkembangan pada suatu wilayah. Kawasan ini meliputi sepanjang jalan tol dan akses jalan Tol Suramadu dan sekitarnya seluas $\pm$ 600 ha. Secara umum, peruntukannya dititikberatkan pada keberadaan industri ringan dan hijau yang didukung dengan kawasan perdagangan, wisata dan permukiman.

B. Kawasan Industri dan Pelabuhan Socah

Pengembangan pelabuhan Socah yang terintegrasi dengan Kawasan Industri pendukungnya merupakan perencanaan jangka menengah (*intermediate term planning*) dalam pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan industri di Madura.

C. Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan

Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis dan Arosbaya adalah kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Kawasan ini direncanakan memiliki akses langsung dengan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu melalui pengembangan jalan akses Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan melalui *interchange* Burneh. Perkembangan 3 (tiga) kawasan strategis dimaksud didukung dengan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti

kawasan pendidikan di Desa Telang Kecamatan Kamal, perkembangan masing-masing ibu kota Kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

D. Kawasan Agropolitan dan Agrowisata

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bangkalan meliputi kecamatan Socah-Burneh-Bangkalan (SOBURBANG), Kecamatan Socah sebagai pusat Kota Tani di Kawasan Agropolitan SOBURBANG (disebut Kota Tani Utama), sedangkan Kecamatan Burneh dan Bangkalan merupakan Hinterland dari kawasan tersebut.

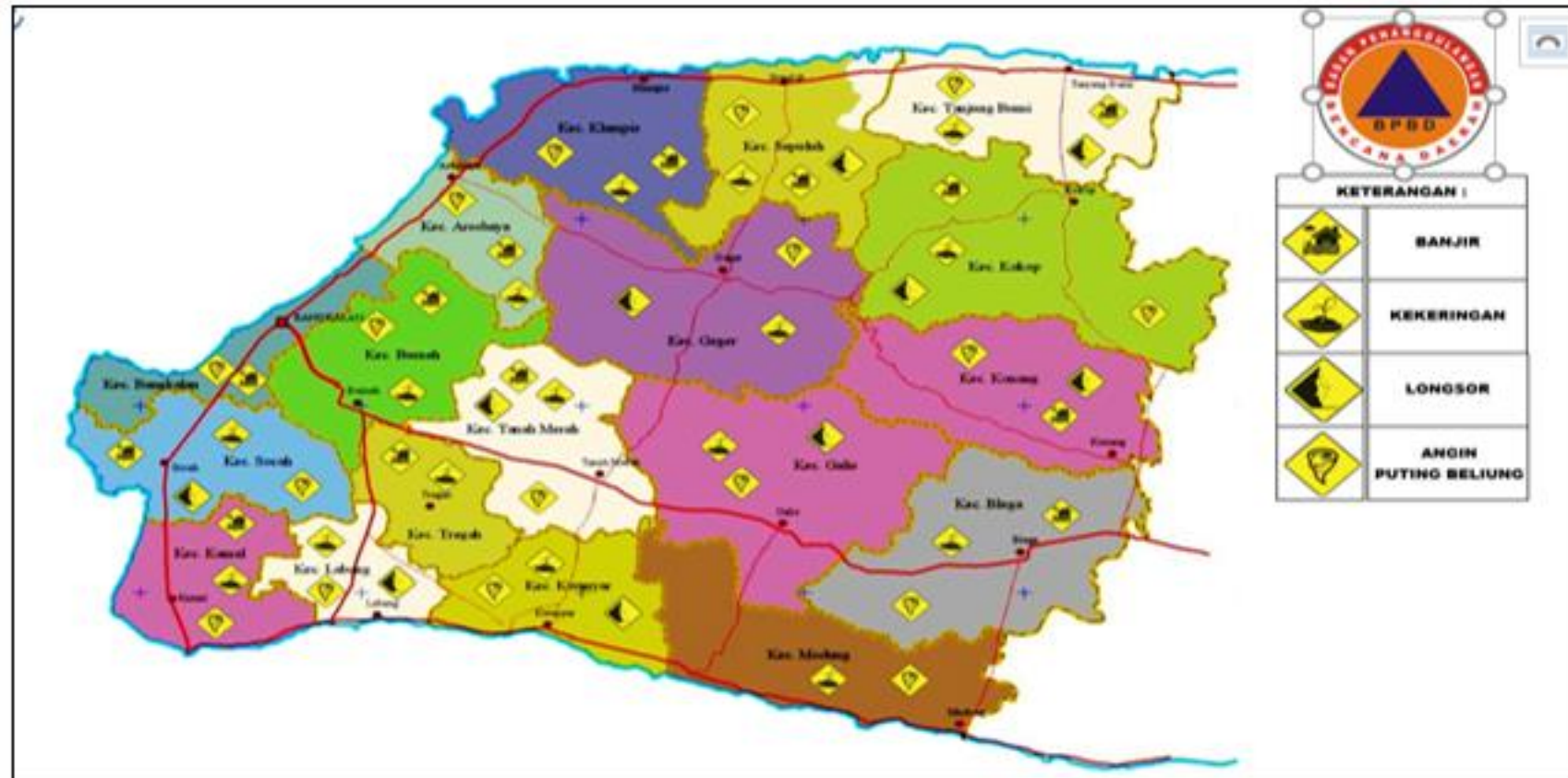
Selanjutnya, pengembangan kawasan agrowisata yang dikembangkan adalah Arosgerah (Arosbaya-Geger dan Tanah Merah). Adapun Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan SOBURBANG dan Agrowisata Arosgerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatan agribisnis.

E. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bangkalan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan banjir yang meliputi: Kecamatan Blega, Kwanyar, Modung, Tanjung Bumi, Socah dan Sepulu.
- b. Kawasan rawan longsor yang meliputi: Kecamatan Kokop, Geger, Galis, Klampis, Tanjung Bumi, Burneh dan Konang.
- c. Kawasan rawan puting beliung yang meliputi: Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Geger, Kwanyar, Tragah, Burneh dan Bangkalan.
- d. Kawasan rawan abrasi yang meliputi: Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis, Arosbaya, Modung, Kwanyar, Bangkalan, Socah dan Kamal.
- e. Kawasan Rawan Kekeringan: Kecamatan Kokop, Tragah, Konang, Galis, Labang dan Tanah Merah.

Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangkalan



Sumber data: BPBD Kabupaten Bangkalan, 2018

2.3. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965, Bangkalan didirikan menjadi sebuah Kabupaten. Kabupaten Bangkalan secara administrasi terbagi menjadi 18 kecamatan dan terbagi lagi menjadi 273 desa dan 8 kelurahan.

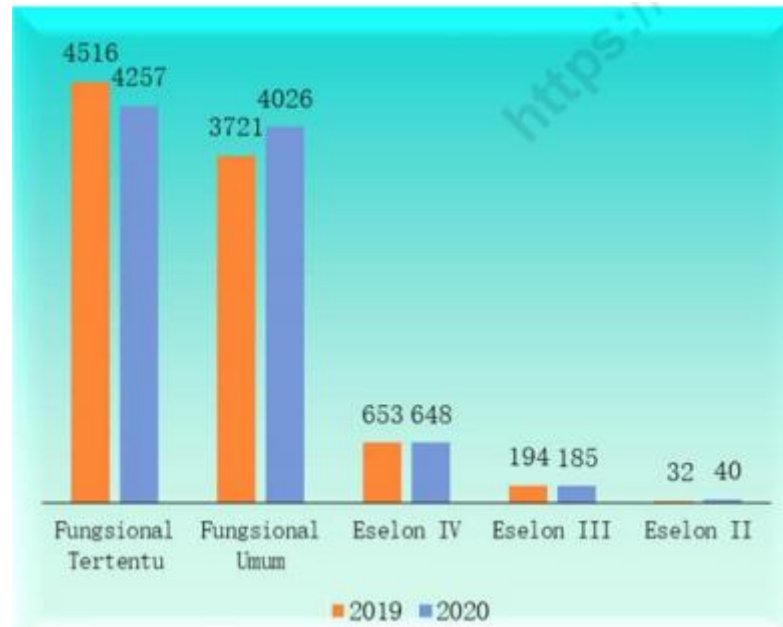
Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Tahun 2020

Wilayah Administrasi	Jumlah
Kecamatan	18
Desa	273
Kelurahan	8

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

Sedangkan satuan lingkungan yang berada di bawah desa/kelurahan mempunyai satuan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya berupa RW kemudian dibagi dalam RT, dan sebagian lagi merupakan Dusun. Setiap desa/kelurahan tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Desa / lurah dan dibantu beberapa staf/ perangkat.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan sebanyak 9.156 pegawai, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 9.116. PNS di Kabupaten Bangkalan terdiri dari fungsional tertentu, fungsional umum dan pejabat struktural (Eselon IV, III dan II). PNS pada fungsional tertentu merupakan yang terbanyak. Sedangkan menurut tingkat pendidikan yang terbanyak adalah lulusan sarjana/pasca sarjana yang mencapai 67,77 persen.

Gambar 2.2. Komposisi SDM PemKab Bangkalan, 2020

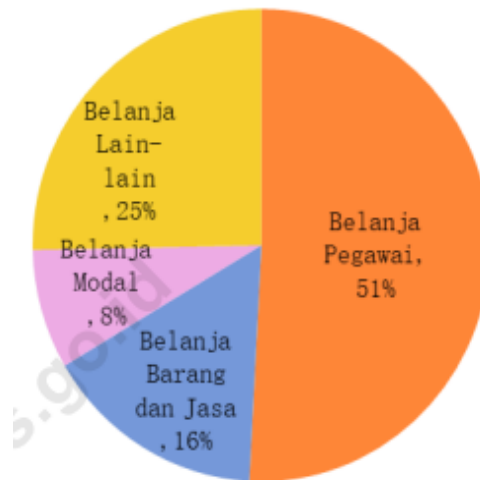
Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.4. APBD

Jumlah anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk membiayai pembangunan di wilayahnya pada tahun 2020 mencapai 2,059 triliun rupiah, terdiri dari belanja pegawai 1 ,047 triliun rupiah, belanja barang dan jasa 322,2 miliar rupiah, belanja modal 168,8miliar rupiah dan sisanya 521,3 miliar rupiah digunakan untuk belanja lain-lain.

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 mencapai 2,48 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 1 1 persen atau tepatnya 198 miliar rupiah. Sedangkan, dana perimbangan mencapai 1,21 triliun rupiah atau sekitar 66 persen Dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menyumbang sebesar 416,6 miliar rupiah atau sekitar 23 persen terhadap pendapatan daerah wilayah ini.

Gambar 2.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan 2020 (%)



Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

Tabel 2.2. Realisasi APBD Bangkalan 2019 - 2020 (Miliar)

Realisasi	2018	2019	2020
Belanja Daerah	2260,9	2482,1	2059,6
Belanja Pegawai	1104,3	1153,7	1047,3
Belanja Barang dan Jasa	340,9	349,6	322,2
Belanja Modal	366,7	485,0	168,8
Belanja Lain-lain	449,0	493,7	521,3
Pendapatan Daerah	2074,4	1828,1	2105,2
PAD	239,5	198,0	233,2
Dana Perimbangan	1344,8	1213,5	1314,1
Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	490,1	416,6	557,9
Belanja Pemerintah	2260,9	2482,1	2059,6
Belanja Tidak Langsung	1257,4	1324,1	1294,2
Belanja Langsung	1003,5	1158,0	765,4

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.5. Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 1.060.377 jiwa. Laju Pertumbuhan penduduk per Tahun 2010 – 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,58 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 97,2. Kemudian Angka Dependency Rasio (Rasio Ketergantungan) sebesar 41,34 menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

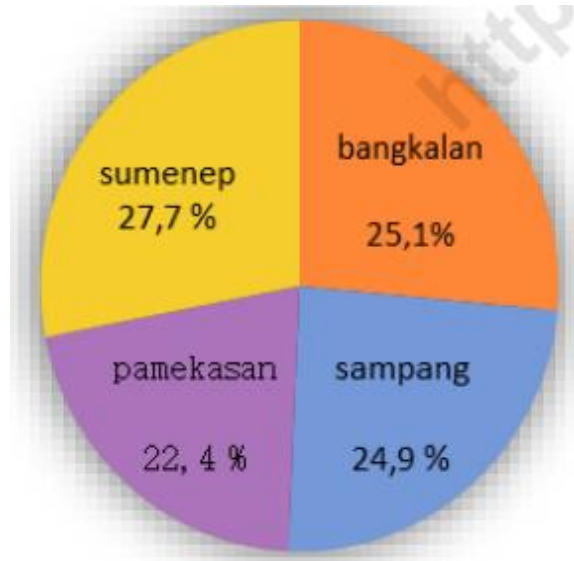
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020

Uraian	Satuan	SP2010	2018	2019	2020
Total	jiwa	970 894	978 892	986 672	1 060 377
Laki-laki	jiwa		467 728	471 272	522 782
Perempuan	jiwa		511 164	515 400	537 595
Pertumbuhan	%		0,82	0,79	1,58
Sex Ratio	%		91,50	91,44	97,2
Kepadatan	jiwa/km ²		777	783	841,47
Dependency Ratio	%		53,06	54,06	41,34

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk penduduk di Kabupaten Bangkalan tahun 2020 mencapai 842 jiwa /km² dengan Kecamatan Bangkalan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi yang mencapai lebih dari 2 463 jiwa/km². Bila dibandingkan kabupaten lainnya di Madura, Bangkalan adalah kabupaten dengan populasi kedua di Madura dengan populasi sebesar 25,1 persen. Sedangkan populasi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sumenep sebesar 27,7 persen.

Gambar 2.4. Komposisi Penduduk 4 Kabupaten di Madura Tahun 2020

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.6. Ketenagakerjaan

Dari jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.060.377 jiwa terdapat 746.659 jiwa atau 70,4 persen merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK 15 th keatas). Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja sebanyak 500.295 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 456.436 orang bekerja atau setara dengan 43 persen dan sisanya adalah penduduk pengangguran terbuka atau setara dengan 8,77 persen.

Pada tahun 2020, berdasarkan status pekerjaan utama, pekerja keluarga/tidakdibayar menduduki peringkat pertama di Kabupaten Bangkalan dengan persentase mencapai 27 persen. Disusul kemudian oleh buruh/karyawan dengan persentase 21 persen, disusul berusaha dibantu buruh tetap sebesar 20 persen, berusaha sendiri mencapai 19 persen. Posisi kelima adalah pekerja bebas mencapai 10 persen dan paling kecil adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 3 persen.

Tingkat pengangguran harus dilihat dari dua sisi oleh pemerintah daerah, pertama jumlah pengangguran merupakan cermin ketersediaan tenaga kerja yang siap melaksanakan program pemerintah kedepan. Disisi yang lain seandainya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai

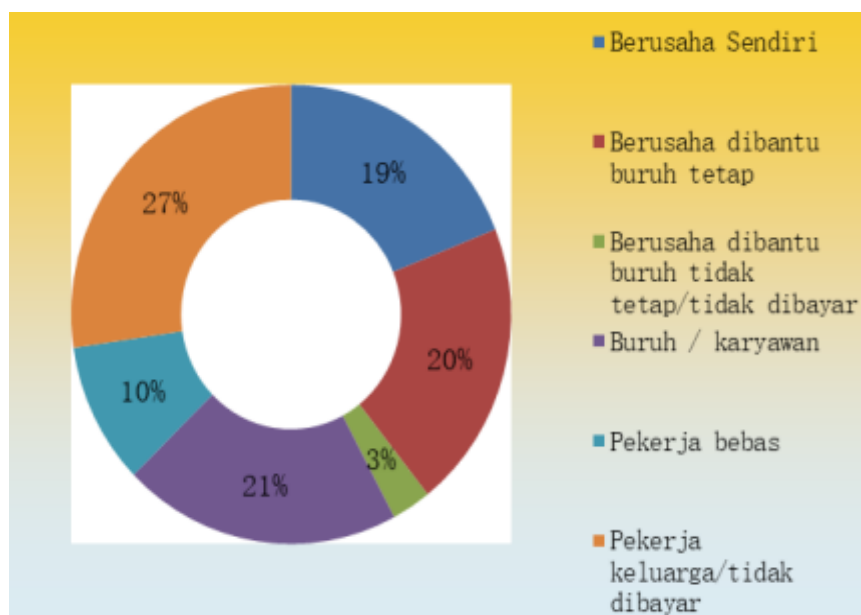
dengan pengangguran merupakan ancaman sosial yang rawan untuk terganggu.

Tabel 2.4. Statistik Ketenagakerjaan Bangkalan 2020

Rincian	Satuan	Jumlah
Penduduk usia kerja 15 th+	orang	746 659
Angkatan Kerja	orang	500 295
TPAK	%	67
Tingkat Pengangguran	%	8.77
Bekerja	orang	456 436
Mencari Pekerjaan	orang	33 531

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

Gambar 2.5. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020



Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.7. Aspek Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis Huruf Latin sebesar 84,94 persen. Sedangkan Angka Melek Huruf sebesar 88,91 persen.

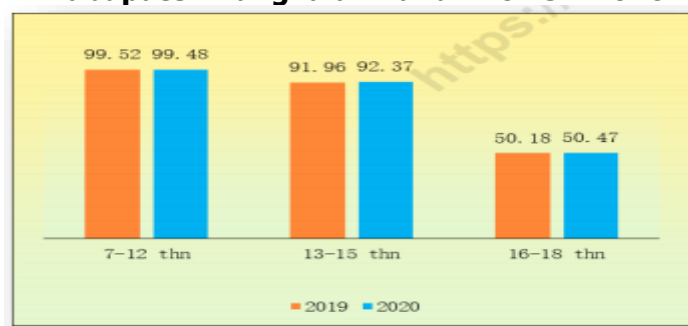
Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu atau yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) terbagi menjadi umur 7-12 tahun, umur 13-15 tahun dan umur 16-18 tahun. Dari grafik menunjukkan bahwa secara total APS Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 mengalami penurunan di tingkatan umur 7-12 tahun, sedangkan di tingkatan umur 13-15 tahun dan umur 16-18 tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.5. Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Bangkalan Tahun 2020

Uraian	Satuan	Jumlah
Huruf Latin	%	84,94
Huruf Lainnya	%	58,26
Angka Melek Huruf (AMH)	%	88,91

Sumber: Statistik Kesra Prov Jawa Timur, 2021

Gambar 2.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur, Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2020



2.8. Aspek Kesehatan

Hampir semua sarana kesehatan di Kabupaten Bangkalan telah tersedia, walaupun dengan jumlah yang bervariasi. Pada tahun 2020, Kabupaten Bangkalan telah tersedia 6 Rumah Sakit yang terdiri dari 4 Rumah Sakit Umum dan 2 Rumah Sakit Bersalin. Jumlah ini masih ditunjang oleh Puskesmas yang juga telah menyediakan fasilitas rawat inap.

Di samping itu masyarakat Bangkalan yang membutuhkan pelayanan kesehatan masih bisa memanfaatkan pelayanan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Dokter Swasta. Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Tenaga kesehatan juga sudah cukup memadai mulai dari Dokter spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi sampai Bidan dan Perawat. Selain upaya peningkatan sarana dan tenaga kesehatan, hal yang harus terus ditingkatkan adalah memaksimalkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat Kabupaten Bangkalan menjadi lebih baik.

Tabel 2.6. Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangkalan, 2019-2020

FASILITAS KESEHATAN	2019	2020
Rumah Sakit	4	4
Rumah Sakit Bersalin	3	2
Poliklinik	9	11
Puskesmas	29	31
Puskesmas Pembantu	72	72
Apotek	27	29

Tabel 2.7. Tenaga Kesehatan di Bangkalan 2019-2020

UNIT KERJA	2019	2020
Dokter Umum	104	110
Dokter Spesialis	74	55
Dokter Gigi	27	26
Dokter Gigi Spesialis	4	4
Perawat	1 041	993
Bidan	1 101	1 133
Ahi Gizi	25	32

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.9. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Pengukuran pembangunan manusia difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*).

Dengan melihat perkembangan angka IPM lima tahun terakhir, capaian kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan sepertinya tidak terlalu signifikan. Angka IPM Bangkalan dari tahun 2016 sebesar 62,06 sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, dan terakhir tahun 2020 sebesar 64,11. Dalam lima tahun hanya meningkat 2,05 persen. Bila dicermati dari Indeks pembentuk IPM. Umur Harapan Hidup, memiliki perkembangan yang positif dari sebesar 69,77 di tahun 2016 menjadi sebesar 70,18 di tahun 2020. Indeks Pendidikan yang variabelnya meliputi HLS dan RLS, juga mengalami peningkatan. Untuk HLS tahun 2016 tercatat sebesar 11,56 pada tahun 2020 telah mencapai 11,6. Untuk RLS dari 5,13 pada tahun 2016, pada tahun 2020 telah mencapai 5,95. Indeks Daya Beli, dari sebesar 8.030 di tahun 2016, pada tahun 2020 telah mencapai 8.610.

Gambar 2.7. IPM Kabupaten Bangkalan, 2016-2020



Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

Tabel 2.8. Indikator Penyusun IPM Kabupaten Bangkalan, 2016 – 2020

Tahun	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (000)
2016	69.77	11.56	5.13	8 030
2017	69.82	11.57	5.14	8 192
2018	69.94	11.58	5.33	8 393
2019	70.11	11.58	5.33	8 393
2020	70.18	11.6	5.95	8 610

Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.10. Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (Non Makanan). Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas), Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Bangkalan mencapai 60,71 persen digunakan untuk konsumsi makanan sedangkan sisanya 39,29 persen untuk konsumsi bukan makanan atau dalam bentuk besaran rupiah rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar Rp. 480,793,- dan untuk konsumsi non makanan sebesar Rp. 311,142,- dengan total pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp 791 .935,-.

Pengeluaran makanan terbesar adalah kelompok makanan dan minuman jadi yakni sebesar 17,28 persen disusul tembakau dan sirih sebesar 10,28 persen, padi-padian sebesar 8,97 persen dan pengeluaran makanan terkecil ada pada umbi-umbian sebesar 0,43 persen. Sedangkan pengeluaran bukan makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas perumahan sebesar 22,29 persen disusul aneka barang, jasa sebesar 9,62 persen, dan yang terkecil adalah kelompok pajak, pungutan, asuransi sebesar 2,15 persen.

Tabel 2.9. Pengeluaran Rumah tangga, 2020

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)	(%)
Pengeluaran makanan	480 793	60.71
a. Padi-padian	71 024	8.97
b. Umbi-Umbian	3 404	0.43
c. Ikan	45 681	5.77
d. Daging	21 035	2.66
e. Telur & Susu	20 157	2.55
f. Sayur-Sayuran	33 188	4.19
g. Kacang-Kacangan	11 213	1.42
h. Buah-Buahan	12 863	1.62
i. Minyak & Lemak	12 257	1.55
j. Bahan Minuman	14 038	1.77
k. Bumbu-Bumbuan	10 112	1.28
l. Konsumsi Lainnya	9 810	1.24
m. Mak & Min Jadi	134 598	17.00
n. Tembakau & Sirih	81 414	10.28
Pengeluaran non makanan	311 142	39.29
a. Perum & Fasilitas ruta	176 541	22.29
b. Aneka Barang & Jasa	76 224	9.62
c. Pakaian, Alas Kaki, Ttp kpl	18 881	2.38
d. Barang Tahan Lama	12 766	1.61
e. Pajak, Pungutan, & Asrn	17 057	2.15
f. Keperluan Pesta & Upcra	9 674	1.22
Total Pengeluaran	791 935	100

Gambar 2.8. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan di Kab Bangkalan



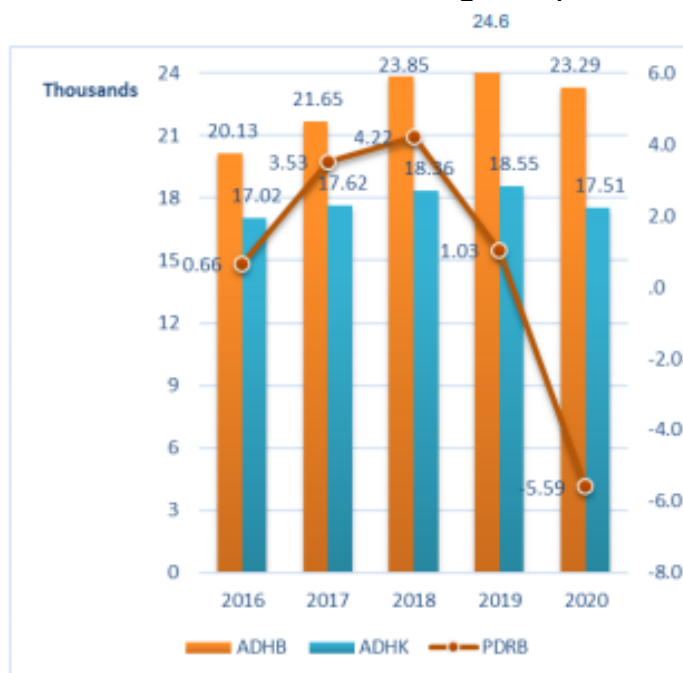
Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2021

2.11. Pendapatan Regional

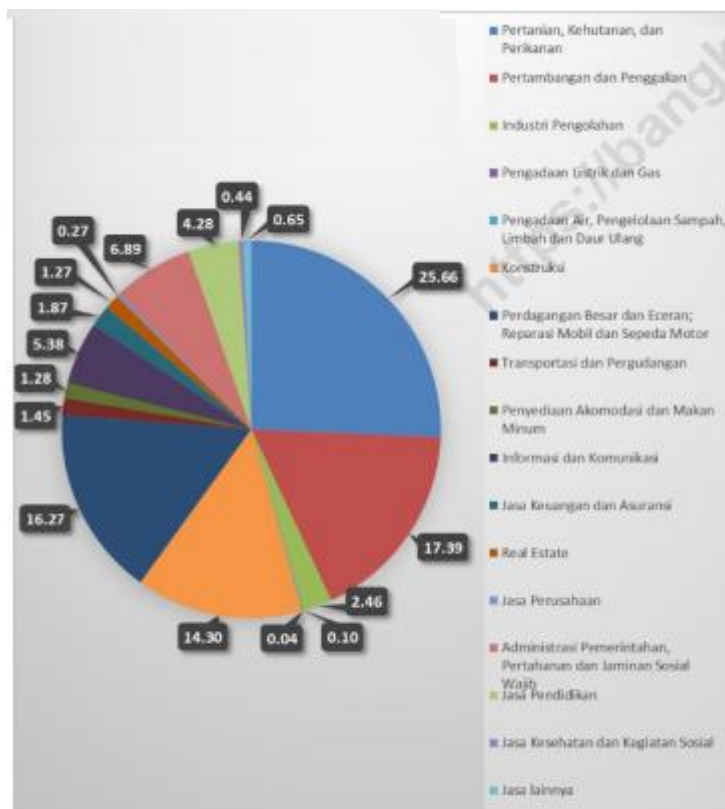
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pada tahun 2020, nilai PDRB Bangkalan mencapai sekitar 23,29 triliun rupiah. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bangkalan tahun 2020 mencapai 17,5 triliun rupiah atau menurun 6 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 minus 5,59 persen dengan migas. Menurut distribusinya, struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada tahun 2020 mencapai 25,66 persen, seperempat nilai PDRB Bangkalan. Sedangkan yang mempunyai peranan terkecil berada di kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya menyumbang sebesar 0,04 persen.

Gambar 2.9. PDRB Kab Bangkalan, 2020



Gambar. 2.10. Peranan Sektor Ekonomi di Kab Bangkalan (%), 2020



2.12. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Jenis dan Fungsi Jalan

Panjang jalan Kabupaten Bangkalan sekitar 721.365 Km. Jaringan jalan di Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier terutama untuk jalan utama. Berdasarkan fungsi jalan, maka jalan-jalan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan termasuk ke dalam jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

Koridor Surabaya-Madura saat ini telah dilayani oleh Jembatan Suramadu selain layanan transportasi penyeberangan Ujung-Kamal. Jembatan Suramadu menjadi koneksi Arteri Primer Jaringan pulau Jawa dengan jaringan pulau Madura. Jembatan Suramadu juga berfungsi sebagai konektor antara jaringan jalan tol Surabaya dengan jaringan arteri primer dan jaringan jalan tol pada masa depan. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura-Surabaya terletak di Kecamatan Labang.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi akses yang menunjang perkembangan di Pulau Madura secara keseluruhan. Untuk kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal.

B. Sarana Dan Prasarana Pendukung Transportasi

Sarana angkutan umum di Kabupaten Bangkalan dilayani oleh jenis angkutan MPU, bus dan mobil barang serta angkutan laut. Jalur atau rute angkutan umum yang ada berupa angkutan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Angkutan Bus melayani jalur antar kota di Pulau Madura-Surabaya. Sedangkan, angkutan laut melayani penyeberangan Bangkalan-Surabaya dan Bangkalan-Gresik.

C. Posisi Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kabupaten Bangkalan dalam ruang lingkup Gerbang Kertasusila (GKS) sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan terhadap peranan dan struktur ruang kabupaten dalam konstelasi Lokal, regional maupun nasional. Dalam ruang lingkup regional Bangkalan akan menjadi primary urban atau perkotaan utama di kluster Madura dalam struktur Surabaya Metropolitan Area (SMA). SMA merupakan antisipasi dari perkembangan kota Surabaya sehingga kawasan sekitarnya menjadi kawasan penyangga termasuk di dalamnya Kabupaten Bangkalan yang meliputi wilayah pengembangan Kamal, Socah, Labang, Burneh, Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi.

Sebagai daerah penyangga kota Surabaya yang mendukung sektor industri, Kabupaten Bangkalan dapat terus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang. Untuk itu perlu pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan pelabuhan di pantai utara Bangkalan, serta mendukung pembangunan kawasan suramadu dan jalan tol yang mengaksesnya.

D. Ketersediaan Air Bersih

Pengembangan industri dan pemukiman di kabupaten Bangkalan membutuhkan ketersediaan air bersih yang salah satunya akan dipenuhi melalui mata air Sumber Pocong yang merupakan salah satu mata air yang baku daerah Bangkalan dengan debit sungai hingga mencapai 4,5 m³/det disaat musim hujan dan 5 m³/det. Adapun kebutuhan air untuk industri yang akan datang direncanakan instalasi pengolahan air baku yang bisa menjangkau kawasan peruntukan industri yang telah ditentukan.

Sumber Daya air merupakan sumber daya yang berguna atau potensial sebagai manusia seutuhnya. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, aktivitas lingkungan dan rekreasi. Permintaan air telah melebihi suplai di berbagai kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terus meningkat sehingga mengakibatkan permintaan terhadap air bersih meningkat pula.

Beberapa sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM adalah Sumber Pocong dimana debitnya dari sumber mata air ini adalah 200 liter/detik digunakan 80% oleh PDAM, debit dari sumber sungai 4500 liter/detik digunakan 30% oleh PDAM. Potensi dari Sumber Mata Air ini sangat besar untuk perencanaan pembangunan ke depan mengingat sampai saat ini pemanfaatan sumber mata air Pocong masih relatif rendah khususnya untuk air minum, sebagian besar air dari Sumber Pocong disalurkan melalui saluran pembuangan.

2.13. Iklim Investasi

Kabupaten Bangkalan menjadi primadona baru bagi investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk berbisnis. Pasca pembangunan Jembatan Suramadu dan bencana lumpur di Sidoarjo memberikan peluang bagi Kabupaten Bangkalan untuk bersaing dengan - daerah lain dalam usaha menarik pemilik modal baik yang bergerak di bidang konstruksi, industri maupun migas. Hal ini di

dasarkan pada pertimbangan biaya transportasi hasil industri menuju pelabuhan baik laut maupun udara guna memasarkan produknya.

Beberapa investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan antara lain: PT. Pelabuhan Socah, dan PT MISI (Madura Industrial Seaport City), Wings Group, PT. Adiluhung, PT Suramadu Sukses Sejahtera, PT. Unilever, dan lainnya.

A. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Bangkalan yang terjaga dengan baik akan menjadi situasi yang kondusif dan sangat mendukung bagi terlaksananya segala kegiatan pembangunan. Oleh karena itu segenap lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan Kamtibmas. Keberadaan Satuan Tugas Perlindungan masyarakat desa (Satgas Linmas) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kamtibmas. Jumlah personil Linmas pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.405 Personil. Selain itu peran Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bangkalan kondusif. Hal ini dapat digambarkan bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Adapun indikator di Kabupaten Bangkalan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keamanan dan ketertiban antara lain: cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cakupan rasio petugas Linmas, serta cakupan pelayanan bencana kebakaran. Capaian ketiga indikator tersebut mencapai 100%.

B. Pelayanan Perijinan

Pelayanan menjadi hal penting untuk ditelusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya undang-undang tersebut akan mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan hak-hak asasi manusia akan melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Kepentingan pemerintah Daerah terhadap pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi Daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta penerbitan izin menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun untuk mencegah terjadinya pungutan pajak dan retribusi yang berlebihan serta perizinan yang menghambat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penting dan perlunya pengembangan kinerja birokrasi pemerintah yang kompetitif seiring dengan perubahan trend globalisasi telah menjadi agenda penting bagi pemerintahan di banyak Negara. Tetapi upaya kearah tersebut masih banyak mengalami permasalahan serius, terutama menyangkut keberadaan dan penerapan sistem dan lembaga birokrasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan sistem adaptif terhadap dinamika masyarakat, mengadopsi nilai-nilai yang relevan dari dunia bisnis untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik.

Hakekat pelayanan perizinan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan wujud dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Menggunakan Asas Transparansi,

Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan serta memperhatikan dan menerapkan prinsip standar pelayanan, pola penyelenggaraan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan penyelesaian pengaduan.

Tabel 2.10. Lama Proses Perijinan Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)
1	SIUP	3 Hari	4 Dokumen
2	TDP	3 Hari	10 Dokumen
3	IUI	5 Hari	17 Dokumen
4	TDI	5 Hari	6 Dokumen
5	IMB	45 Hari	8 Dokumen
6	HO	14 Hari	6 Dokumen

Sumber Data: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 2021



3.1. Potensi

1. Potensi Sektor Industri

Potensi pada sektor ini didominasi oleh industri kecil dan kerajinan, antara lain: industri Kerajinan batik tulis, industri bahan dasar agel, meubeler baik ukir maupun inlay, keramik/genteng, hasil laut dan lain-lain. Potensi yang ditawarkan adalah industri kecil yang berbasis hasil pertambangan yaitu : marmer dan keramik.

Dengan melihat banyaknya bahan baku yang tersedia serta tingginya permintaan, terbuka juga peluang pengembangan industri berbahan dasar agel. Industri lain yang mungkin dikembangkan diantaranya bahan baku dari hasil laut (kerupuk, petis) dan Batik tulis.

Untuk industri besar, potensi yang ada antara lain: industri Kemaritiman berikut teknologinya, semen, phospat dan pengelolaan kawasan industri. Peluang investasi yang ditawarkan Kabupaten Bangkalan adalah Pengembangan industri semen dan keramik yang didukung deposit bahan baku, dan pengelolaan kawasan industri yang ditunjang fasilitas cukup memadai.

Peluang industri menengah potensial ada pada industri Genteng Glazuur (Genteng Lapis Mengkilap) dimana merupakan wujud pengolahan bahan baku clay (lempung) yang berkualitas dan melimpah di Bangkalan berikut tingginya permintaan pasar Genteng Glazuur di Madura. Untuk peluang pengembangan & investasi industri Genteng Glazuur, kajian teknis pengembangannya telah dilakukan oleh Disperindag Kab. Bangkalan.

**Tabel 3.1. Potensi Produk Unggulan Industri Kecil
Kabupaten Bangkalan**

No	Nama Produk	Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Batik tulis	Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Bangkalan
2	Emping melinjo	Burneh
3	Kerupuk udang	Modung, Kwanyar, Kamal, Bangkalan, Tanah Merah, Blega
4	Terasi	Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Bangkalan
5	Sangkar Burung	Galis, Socah, Konang, Tanah Merah
6	Jamu tradisional	Bangkalan, Tanjung Bumi, Labang
7	Kerajinan Batu-batuan	Tragah
8	Pande Besi	Tersebar merata
9	Anyaman tikar	Konang
10	Genteng	Tersebar merata
11	Ukiran kayu	Tersebar merata
12	Gragu	Tersebar merata
13	Kapur	Tersebar merata
14	Keranjang	Tersebar merata
15	Kasur	Tersebar merata
16	Konveksi	Tersebar merata
17	Minyak kelontong	Tersebar merata
18	Gerabah	Klamps dan Geger
19	Welit	Tersebar merata
20	Gula siwalan	Sepulu dan Klamps
21	Pecut	Galis, Blega, Konang dan Modung
22	Kerupuk opak	Kwanyar, Tanah Merah, Galis, Tragah, Labang
23	Kerupuk terung	Socah, Kamal, Bangkalan, Arosbaya, Sepulu, Tanjung Bumi
24	Petis udang	Socah, Kamal, Bangkalan, Arosbaya, Sepulu, Klamps
25	Tali agel	Tersebar merata

2. Potensi Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan pada saat ini terkonsentrasi di Pasar Baru/Modern "Ki Lemah Duwur" yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma (Ringroad) Bangkalan. Selain Pasar Modern ini, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sudah merampungkan pembangunan sebuah Pusat Perniagaan sekaligus Mall pertama di Madura yang terletak satu kompleks dengan Pasar Baru/Modern "Ki Lemah Duwur" yakni "Bangkalan Plaza".

Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu (Surabaya – Madura) diharapkan lalu lintas perdagangan barang dan Jasa lebih lancar. Diharapkan pula Jembatan Suramadu akan memperbesar akses perdagangan yang dahulu sangat terbatas dan hanya dilayani oleh lintas

penyeberangan kapal ferry pelabuhan Kamal Bangkalan dan Tanjung Perak Surabaya.

Untuk masa yang akan datang, kegiatan perdagangan di Kabupaten Bangkalan akan dipusatkan di Bangkalan Golden Triangle (Segitiga Emas Bangkalan), sebagai pusat perekonomian Bangkalan. Tempat yang dialokasikan meliputi Jalan Halim Perdana Kusuma di Pusat Kota Bangkalan, Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Labang sebagai pintu masuk Jembatan Suramadu.

Tabel 3.2. Potensi Komoditi Perdagangan dan Eksport Kabupaten Bangkalan

No	Nama Komoditi	Jenis	Kriteria	Negara Tujuan
1	ANIMAL & FISH	IKAN KERING, ASAP, RAJUNGAN DLL	POTENSI	JEPANG, EROPA, AUSTRALIA
2	INSTRUMENT	GITAR AKUSTIK DAN ELEKTRONIK	POTENSI	EROPA DAN AUSTRALIA
3	JEWELLARY	CINCIN	POTENSI	EROPA DAN AUSTRALIA
4	FOOD	TAHUN, TEMPE, KERUPUK, PETIS, KECAL, ABON IKAN TONGKOL DLL	POTENSI	ASIA, EROPA, AUSTRALIA
5	TEXTILE	BATIK TULIS	POTENSI	ASIA, EROPA, AUSTRALIA
6	FRUIT & VEGETABLE	SALAK, MANGGA, PISANG, MELATI	POTENSI	ASIA, EROPA, AUSTRALIA
7	WOOD PULP PRODUCT	KAYU OLAHAN	POTENSI	EROPA DAN AUSTRALIA
8	WOOD & TRANSPORTATION	KUSEN & KAPAL	POTENSI	EROPA & AUSTRALIA
9	FURNITURE	MAUBEL	EKSPORT	SPANYOL, YUNANI, BELANDA, JERMAN, AUSTRALIA, PERANCIS
10	MINERAL PRODUCT	PHOSPAT	EKSPORT	INGGRIS, BELANDA, PERANCIS, YUNANI
11	KERAJINAN	ANEKA SOUVENIR	EKSPORT	BELANDA, YUNANI, JERMAN, PERANCIS, AUSTRALIA, & DENMARK
12	STONE & GLASS	BATU AKIK, DAN KERAJINAN CLAY	POTENSI	EROPA & AUSTRALIA
13	KOMODITI LAIN - LAIN	SANGKAR BURUNG, TIKAR PANDA, CELURIT, CANGKUL, ANYAMAN BAMBU, ATLI AGEL, POKAK	POTENSI	EROPA & AUSTRALIA

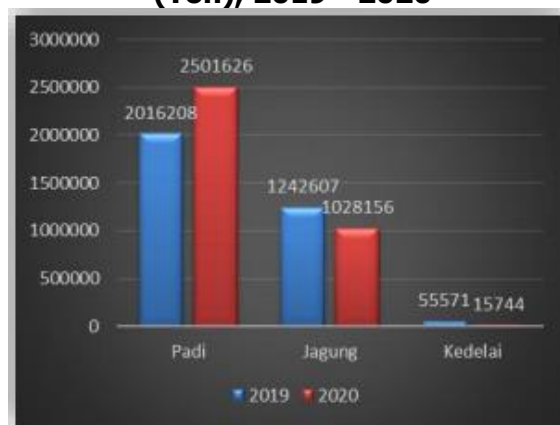
Sumber Data : REDI (*Regional Economic Development Institute*) Tahun 2018

3. Potensi Sektor Pertanian

Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi dalam pengembangan sektor pertanian. Produksi padi pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Dimana produksi padi pada tahun 2019 sebesar 2,016.208 ton dan pada tahun 2020 sebesar 2,501.626 ton. Sedangkan produksi jagung dan kedelai pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Produksi padi dan palawija sangat dipengaruhi oleh produktifitas dan luas panen. Sedangkan produktifitas bergantung pada irigasi, varietas, teknologi cocok tanam, disamping faktor lainnya. Selain padi palawija, Kabupaten Bangkalan juga memiliki komoditas tanaman unggulan lain, diantaranya adalah tanaman buah-buahan seperti: salak, durian, mangga, rambutan dan pisang. Mangga adalah komoditas dengan jumlah produksi terbesar mencapai 277 ribu kuintal. Disusul pisang dan Rambutan dengan produksi masing-masing 137 ribu kuintal dan 31 ribu kuintal. Kabupaten Bangkalan juga terkenal menjadi sentra tanaman bunga melati. Pada tahun 2020 produksinya mencapai 409 ribu kuintal.

Gambar 3.1. Produksi Padi, Jagung, Kedelai di Kabupaten Bangkalan (Ton), 2019 - 2020



Sumber : Bangkalan Dalam Angka 2021

Tabel 3.3. Produksi Buah-buahan dan bunga melati (kuintal) Tahun 2019-2020

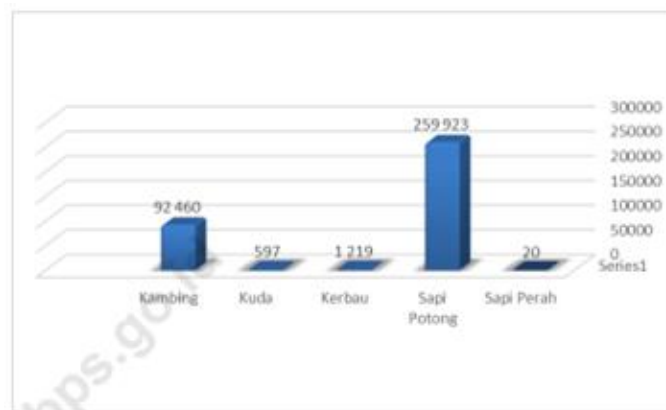
Tanaman	2019	2020
Durian	3 190	3 144
Jambu Biji	17 902	6 527
Jambu Air	1 536	1 187
Jeruk Siam	1 830	4 503
Mangga	221 339	277 262
Nangka	12 194	12 519
Pisang	75 592	137 685
Pepaya	6 267	7 422
Rambutan	10 224	31 385
Salak	6 644	7 700
Melati	273 172	408 956

Sumber : Bangkalan Dalam Angka 2021

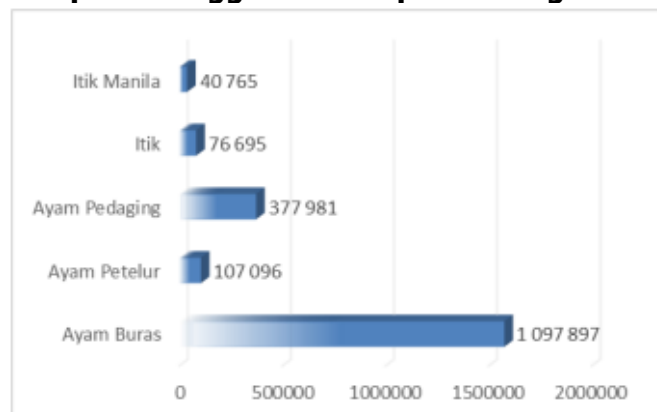
Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang produksinya merupakan sumber protein bagi masyarakat. Sub sektor ini selain menghasilkan daging juga menghasilkan susu dan ternak besar bisa dimanfaatkan tenaganya untuk mengolah lahan pertanian. Populasi ternak besar tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan yang terbesar adalah sapi potong dengan populasi 259 923 ekor, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan populasi terbesar kedua adalah kambing dengan populasi 92.460.

Sedangkan untuk populasi unggas terbesar adalah Ayam buras yang mencapai 1.097.897 ekor pada tahun 2020, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Populasi unggas terkecil adalah populasi itik manila yang hanya sebesar 40.765 ekor. Secara umum, jumlah populasi unggas pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Gambar 3.2. Populasi Ternak di Kabupaten Bangkalan (Ekor), 2020



Gambar 3.3. Populasi Unggas di Kabupaten Bangkalan (Ekor), 2020



Sumber : Bangkalan Dalam Angka 2021

4. Potensi Sektor Perkebunan

Komoditas perkebunan dikembangkan masyarakat Kabupaten Bangkalan secara tradisional maupun modern. Beberapa diantara komoditas perkebunan tersebut adalah: Kelapa, Kapuk Randu, Jambu Mete, Agel, dan Cabe Jamu. Untuk Jambu Mete, produk kacang mentenya memiliki kualitas yang baik (kualitas ekspor) sehingga sangat layak sebagai peluang investasi dan perdagangan.

Tabel 3.4. Produksi Perkebunan di Kabupaten Bangkalan

No	Jenis	Luas Areal (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Lokasi (Kec.)
1	KELAPA	8.117	3.105	1.336.43	GALIS, GEGER, KOKOP
2	KAPUK RANDU	3.272	2.224	944.25	KWANYAR, GALIS, TANAH MERAH
3	JAMBU MENTE	7.084	2.190	847.22	TANJUNG BUMI, GEGER, KOKOP
4	SIWALAN	862	445	481.98	KOKOP, SEPULU, BLEGA
5	CABE JAMU	361	97	710.83	TANJUNG BUMI, TANAH MERAH, BLEGA
6	PINANG	39	24	990.77	KAMAL, BURNEH
7	ASAM JAWA	22	16	-	TERSEBAR
8	CENGKEH	2	2	44.883	GEGER, KONANG
9	KOPI ROBUSTA	4.8	3	-	GEGER
10	POCO/AGEL	240	111	-	KOKOP

5. Potensi Sektor Perikanan

Potensi perikanan baik laut maupun darat di Kabupaten Bangkalan sangatlah besar karena memiliki wilayah laut cukup luas. Selain itu didukung pula sentra-sentra penangkapan ikan (nelayan) dan perikanan darat yang tersebar disepanjang garis pantai Kabupaten Bangkalan. Produk perikanan laut andalan Kabupaten Bangkalan adalah: Udang, Cumi, Tongkol, Ikan Layang, Kakap, Rajungan dan Pari. Sedangkan perikanan darat yang dihasilkan adalah: Ikan Mas, Mujair, Bandeng, Tawes dan Udang Windu. Keseluruh hasil perikanan laut dan darat tersebut merupakan peluang yang baik bagi investasi dan perdagangan. Karena ketersediaan suplai yang

kontinyu sepanjang tahun sesuai musim. Lokasi utama penghasil perikanan adalah: Kec. Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi, Kwanyar. Hasil lain di sektor perikanan adalah rumput laut dengan sentra produksi di Kecamatan Klampis.

Tabel 3.5. Produksi Perikanan (Tangkap Laut) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Jenis	Produksi (TON)	Sentra
1	UDANG PUTIH	700	TANJUNG BUMI, SEPULU, KWANYAR, KLAMPIS, MODUNG, AROSBAYA
2	RAJUNGAN	700	BANGKALAN, KAMAL, KWANYAR, AROSBAYA, TANJUNG BUMI
3	TONGKOL	10.26	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
4	CUMI	233	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
5	TERIPANG	16	SOCAL
6	LAYANG	20.99	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
7	PARI	140	BANGKALAN, SOCAL, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
8	MAYUNG	16.32	AROSBAYA, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
9	DORANG	21	BANGKALAN, AROSBAYA
10	KEMBUNG	29.15	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
11	TENGIRI	17.50	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
12	LAYUR	21.00	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI

Tabel 3.6. Produksi Perikanan (Budidaya) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Jenis	Produksi (TON)	Sentra
1	BANDENG	140	BLEGA, BANGKALAN, MODUNG, SOCAL, AROSBAYA
2	UDANG VANAME	47	BANGKALAN, KAMAL
3	UDANG WINDU	10	BLEGA, KAMAL
4	NILA	12	BURNEH, BANGKALAN, GEGER
5	LELE	24	BLEGA, KAMAL, SOCAL, BANGKALAN, BURNEH, AROSBAYA, GEGER
6	TAWES	1	BANGKALAN
7	LOBSTER AIR TAWAR	1	BANGKALAN, SOCAL
8	GURAME	1	GEGER, BANGKALAN

Tabel 3.7. Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Olahan	Produksi (TON)	Sentra
1	IKAN KERING	424	KWANYAR, SEPULU, KLAMPIS
2	IKAN ASAP	98	SOCAL, LABANG, SEPULU, AROSBAYA, KLAMPIS
3	IKAN PINDANG	208	AROSBAYA, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
4	TERASI	50	AROSBAYA, SEPULU
5	KERUPUK IKAN/UDANG	31	SOCAL, BANGKALAN, KAMAL

6. Potensi Sektor Pariwisata

Bangkalan juga merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Obyek wisata Bangkalan menawarkan berbagai macam jenis wisata tercatat ada 20 obyek wisata yang tersebar di 10 kecamatan. Di antara jenis-jenis wisata yang ada, wisata religi merupakan jenis yang paling banyak menyedot wisatawan. Wisata ini sangat ditunjang dengan adanya makam dari ulama terkenal yang sering disebut Pasarean Syaichona Cholil dan juga Pasarean Aer Mata Ebhu.

Tabel 3.8. Potensi Pariwisata Kabupaten Bangkalan

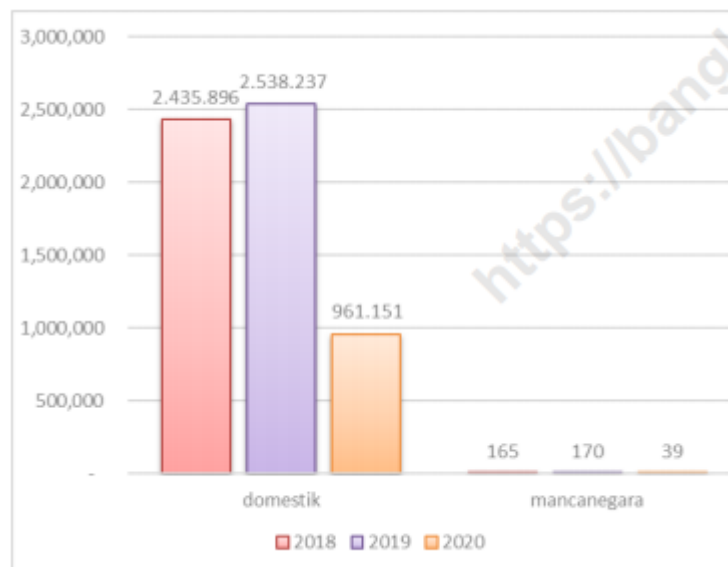
No	Jenis Wisata	Obyek Wisata	Lokasi
1	WISATA ALAM	PANTAI MANERON	SEPULU
		PANTAI SIRING KEMUNING	TANJUNG BUMI
		PANTAI RONGKANG	KWANYAR
		GUA BINTANG	BANGKALAN
		BUKIT GEGER	GEGER
2	WISATA BUDAYA DAN SEJARAH	KERAPAN SAPI	TERSEBAR
		PASAREAN SYAICHONA CHOLIL	BANGKALAN
		PASAREAN AIR MATA IBU	AROSBAYA
		MENARA MERCUSUAR BELANDA	SOCAH
		KELENTENG CINA	BANGKALAN
		KESENIAN HONG-BAHHONG	GEGER
		MUSEUM PURBAKALA	BANGKALAN
3	WISATA MINAT KHUSUS	AGROWISATA KEBUN JAMBU	TERSEBAR
		AGROWISATA KEBUN SALAK	TERSEBAR
		BATIK TULIS	TERSEBAR
		GALANGAN KAPAL TRADISIONAL	TANJUNG BUMI

Hasil penelitian faraby (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan siap bilamana konsep wisata halal benar-benar diterapkan, melihat potensi dari indikator penunjang yang terdiri dari (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Kelembagaan) namun memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan dibenahi dengan ditunjang adanya SK Gubernur bahwa di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata Halal serta komitmen dan sinergi Tokoh Masyarakat, Kyai dari pimpinan daerah dalam menjadikan Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata halal. Para pelaku pariwisata baik hotel, pengelola tempat wisata dan wisatawan siap

dan mendukung apabila Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata halal dengan melihat potensi yang ada.

Wisata sejarah yang ditunjang dengan adanya museum, mercusuar, dan situs benteng kolonial, juga menarik minat wisatawan. Wisata ke sentra industri batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi juga semakin menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2020 banyaknya wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan yaitu sebanyak 961 ribu orang wisatawan domestik dan 39 orang wisatawan mancanegara. Penurunan tersebut terjadi karena adanya Pandemi Covid – 19.

Gambar. 3.4. Jumlah Wisatawan Tahun 2018 - 2020



Sumber : Bangkalan Dalam Angka 2021

7. Potensi Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi investasi yang dapat dikembangkan. Deposit pertambangan di kabupaten Bangkalan adalah jenis pertambangan Galian A dan Galian C. Galian C seperti Batu Kapur, Phospat, Tanah Liat, Pasir Kuarsa, Marmer, Dolomit dan Pasir Urug. Untuk Batu Kapur, berdasarkan penelitian (eksplorasi) yang telah dilakukan, memenuhi syarat sebagai bahan baku industri semen dengan deposit produksi sepanjang 30 Tahun. Untuk Potensi pasir urug,

deposit yang dimiliki yang tersebar di Desa Parseh Kecamatan Socah dan Desa Morombuh Kec. Kwanyar sangat siap dieksploitasi dalam rangka mendukung realisasi pengembangan wilayah/kawasan industri pasca selesainya Jembatan Suramadu.

Sedangkan potensi pertambangan galian A adalah minyak dan gas bumi (Migas). Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, potensi migas di wilayah darat (on-shore) terdapat di 13 Kecamatan 113 Desa Eksplorasi sesuai Uji Sismic-2D dan Eksplorasi di Kecamatan Modung oleh SMEC' Eksplorasi juga dilakukan SPE. di Kecamatan Konang. Sedangkan potensi wilayah laut (off-shore) dan telah dieksploitasi oleh CODECO berada di wilayah lepas pantai Kecamatan Sepulu dan Tanjung Bumi.

Tabel 3.9. Potensi Pertambangan di Bangkalan

No	Bahan Galian C (Minerals)	Lokasi Potensi (Kec.)	Potensi Tambang (Deposits)
1	BATU GAMPING	KOKOP, SEPULU, TANJUNG BUMI, KLAMPIS	14.961.640.547
2	LEMPUNG/CLAY	KOKOP, GEGER, KONANG, GALIS	15.231.442
3	DOLOMIT/DOLOMITE	KAMAL, LABANG, KWANYAR, TRAGAH	4.743.000
4	FOSFAT	BLEGA, LABANG, MODUNG, TRAGAH	1.003.500
5	PASIR	GEGER	300.000
6	PASIR KUARSA	BURNEH, TANJUNG BUMI	71.998.380
7	BATU PASIR	GALIS	30.000
8	KALSIT	MODUNG, BLEGA	85.000

Sumber: REDI (*Regional Economic Development Institute*) Tahun 2018

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang dalam pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga memberikan ruang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program, utamanya adanya perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Bangkalan
3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

4. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Bangkalan.
5. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga - lembaga lainnya.

3.2. Tantangan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pada tahun 2021, meliputi:

1. Dampak pandemi terhadap proses pembangunan daerah (wabah ini tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga semua sektor kehidupan, mulai dari sosial, transportasi, perdagangan, wisata dan juga sektor ekonomi)
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
4. Penanganan permasalahan lingkungan hidup
5. Penanganan bencana yang harus ditingkatkan
6. Angka kemiskinan masih tinggi
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan
8. Rendahnya investor skala besar yang menanam modalnya
9. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, khususnya pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
10. Kurang optimalnya pelayanan publik dalam sistem birokrasi, dan
11. Belum ada kemandirian pemerintah daerah dalam sistem pendanaan.

Sementara itu, prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 meliputi:

1. Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
3. Peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah
4. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan kesehatan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.



4.1. Mengelola Tantangan Proses Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2021 tak lagi memprioritaskan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini fokus terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Bupati Bangkalan menetapkan program prioritas peningkatan sumber daya manusia pada saat rapat paripurna penetapan PAK tahun 2021 di Gedung DPRD Bangkalan hari Senin tanggal 27 September 2021.

Meski pada PAK tahun ini pembangunan tak menjadi prioritas, namun Bupati Ra Latif berjanji bahwa pada tahun 2022 pembangunan akan terus dilakukan. Alasannya, PAK tahun ini anggarannya tidak mampu. Selain itu Bupati Ra Latif juga menyampaikan bahwa pada PAK tahun 2021 ada penurunan target PAD sebesar Rp 1 miliar keseluruhan di semua OPD. Penurunan target PAD ini karena capaian rendah di masa pandemi Covid 19, sehingga target PAD harus turun.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memprioritaskan empat poin pembangunan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun anggaran 2021. Empat poin itu dirangkum dalam tema "pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan industri, pariwisata dan investasi didorong oleh penguatan sumberdaya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik".

Empat prioritas pembangunan itu antara lain; pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,

pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan kesehatan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pada saat pelaksanaan Musrenbangkab di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Selasa (14/04/2021) Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan bahwa perumusan empat prioritas pembangunan itu selain sesuai visi-misi pemerintah Bangkalan, juga berdasarkan hasil musyawarah baik di tingkat desa maupun kecamatan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD kabupaten Bangkalan tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi-misi pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Bupati Ra Latif dalam Musrenbangkab menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai oleh pemerintah Bangkalan pada tahun 2021 diantaranya, peningkatan Indeks pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Selain itu, target Bangkalan adalah memperoleh opini BPK yaitu WTP, status kinerja LPPD sangat tinggi dan penanganan potensi konflik sara 100 persen.

Bupati Ra Latif memaparkan bahwa kemungkinan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi di kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mendatang, antara lain; rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, belum meratanya pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan di berbagai wilayah, tingginya angka kemiskinan karena rendahnya sumberdaya manusia dan kesempatan kerja, dan belum masuknya Bangkalan dalam kategori daerah zona integritas. Untuk itu, Bupati Bangkalan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Bangkalan.

Program Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura dari Pemerintah Pusat menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. Ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di mana Kabupaten Bangkalan menetapkan akses Suramadu sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten. Di tengah padatnya kawasan-kawasan industri seperti Rungkut-Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, maka Bangkalan satu-satunya kabupaten yang potensial sebagai 'pelarian' untuk pengembangan sektor industri Jawa Timur. Berdekatan dengan Surabaya serta dukungan Jembatan Suramadu dan hamparan lahan-lahan yang membentang mulai Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, hingga Kecamatan Burneh, menjadikan Bangkalan primadona bagi para investor untuk mengembangkan usaha.

Menurut Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Ishak Sudibyo, koridor pertama di sepanjang akses Suramadu adalah kawasan perdagangan jasa, di belakangnya didukung kawasan industri berskala regional dan perumahan. Nantinya di kawasan itu akan dibangun beberapa CBD (Central Business District). Pemkab akan menyiapkan lokasinya sesuai koridor yang telah ditentukan, desain bangunannya diserahkan kepada pihak yang membangun (Surya,12/08/2021).

Pemerintah terus melakukan penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Hal ini dilakukan agar wilayah yang berpotensi dalam pengembangan sektor industri dapat dioptimalkan, sehingga memacu perekonomian setempat. Menurut Dirjen KPAII Kemenperin Eko SA Cahyanto, sesuai UU 3/2014 tentang Perindustrian, perlu langkah sinergi di antara pemangku kepentingan terkait, untuk melakukan percepatan,

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan industri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industr. Saat ini, terdapat 22 WPPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan termasuk dalam WPPI Jawa Timur. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembangkan Bangkalan menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB Nasional. Tercatat di 2020, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar Rp2.300 triliun atau 15% terhadap PDB Nasional. Sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur menjadi kontributor terbesar bagi struktur PDRB Provinsi Jawa Timur, yaitu hingga 30,69%.

Secara khusus, nilai PDRB Kabupaten Bangkalan selama 2016-2020 meningkat cukup signifikan hingga 12,6%, dari Rp509 miliar menjadi Rp573 miliar. Industri makanan-minuman menjadi sektor dengan realisasi investasi industri terbesar di Bangkalan. Hal ini sejalan dengan harapan untuk mendorong adanya hilirisasi komoditas di Bangkalan dalam rangka peningkatan nilai tambah, PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Tentunya, aspek tata ruang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan kawasan industri maupun sektor industri. Pembangunan itu harus berada dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Rencana Tata Ruang. Penetapan KPI perlu dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan ekosistem industri, agar dapat menarik investasi dan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebagai salah satu instrumen investasi, dalam praktiknya perlu dilakukan evaluasi lokasi KPI di Bangkalan. Utamanya, dalam hal optimalisasi penggunaannya dan dalam rangka mengakomodir rencana kawasan industri di Bangkalan.

Kemenperin mencatat hingga kini, total terdapat 133 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan penggunaan lahan mencapai 60.000 hektare. Kawasan industri terbukti sangat berperan dalam peningkatan kondisi perekonomian di daerah. Bahkan, pengembangannya dapat memicu multiplier effect yang menggerakkan roda perekonomian daerah secara signifikan. Dalam upaya percepatan penumbuhan kawasan industri baru, Kemenperin telah menetapkan 27 kawasan industri yang dikembangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan berlokasi di Kecamatan Klampis, Bangkalan dengan rencanakan kebutuhan lahan sebesar 600 hektare. Namun, pengembangan kawasan industri ini perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam pembangunan KI Bangkalan ini, dan Kemenperin siap mendorong percepatan pembangunannya.

4.2. Mengelola Tantangan Sinergitas Pembangunan Daerah

Ukuran sinergitas meliputi intensitas koordinasi dan sinkronisasi antar OPD mulai dari tahap formulasi sampai dengan implementasi program tersebut. koordinasi dan kolaborasi lintas sektor belum optimal yang ditandai dengan munculnya fenomena ego sektor, adanya tumpang tindih batas kewenangan antar sektor dan intervensi politik kepentingan yang berimplikasi pada tersendatnya tingkat pengembalian dana bergulir di tingkat petani.

Menurut Covey's (2008a), sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, 11 melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri. Sinergitas merupakan

hasil menciptakan suasana lingkungan dimana orang - orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri (Anonim, 2008).

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Sinergi adalah kerjasama kreatif (partisipasi terarah) antar pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan daerah guna mewujudkan tujuan bersama secara maksimal.

Penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan, disamping berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rentra PD tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemkab Bangkalan.

Sesuai dengan unit analisis pada laporan kinerja ini, maka untuk mengetahui bagaimana mengelola tantangan pembangunan, salah satunya dengan memusatkan pada proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD). Pertimbangannya adalah karena penyusunan dokumen yang dimaksud ini bersifat strategis, yakni menjadi tolok ukur keberhasilan tahapan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang dan sebagai arahan kebijakan perencanaan pembangunan bersifat tahunan. Adapun pedoman penyusunan RPJMD tersebut, menggunakan Perda Nomor 01/2006 masa peralihan (proses pengesahan) yang menindaklanjuti UU. No 25/2004 dan SEB Menteri PPN dan Mendagri di tingkat daerah.

Suasana diskusi pada perumusan RPJMD didominasi oleh unsur pemerintah, yakni antara Ketua Sidang, Kepala OPD dan aparatur dari OPD terkait dan utusan dari Kecamatan. Sementara itu masyarakat lebih banyak diam dan menjadi pendengar, karena belum mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan dibahas dan terbatasnya pemahaman terhadap persoalan pembangunan. Hal ini disebabkan karena materi diskusi baru dibagikan pada saat pelaksanaan diskusi, sehingga kurang cukup waktu bagi masyarakat untuk memahaminya.

Untuk itu agar musrenbang dapat menjadi tempat diskusi atau kerjasama kreatif antar pemangku kepentingan maka salah satu yang harus diperhatikan adalah kesiapan atas materi yang akan dibahas. Panitia penyelenggara musrenbang hendaknya menyiapkan materi dan membagikannya ke semua pemangku kepentingan sebelum musrenbang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan supaya ada kesiapan diantara masing masing peserta untuk mempelajari materi tersebut.

Mencermati hal tersebut, maka mengelola tantangan pada proses musrenbang menjadi satu hal yang mendesak. Tantangan yang dihadapi pada saat musrenbang, diantaranya adalah kesiapan penyelenggaraan (penyiapan materi, tiadanya tata tertib musyawarah), waktu yang sempit dan jumlah peserta sangat banyak, yang didominasi unsur pemerintah. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan musrenbang secara sengaja atau tidak sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Iqbal (2007) konsep partisipasi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah ataupun warga sendiri karena ada ambiguitas konsep dan aplikasi partisipasi dalam tataran praksis. Selain itu, lokalitas dan dimensi waktu juga menjadi penentu maksimalnya ruang partisipasi masyarakat. Karena itu agar pelaksanaan musrenbang berlangsung secara dialogis, maka sebelum musrenbang dilaksanakan sebaiknya didahului dengan diskusi-diskusi dalam skala kecil antar pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Dalam konteks ini maka hendaknya Bappeda membentuk forum-forum pemangku

kepentingan yang membidangi urusan-urusan berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian serta lainnya.

Menelaah proses musrenbang Kabupaten Bangkalan tersebut, maka sebagaimana diungkapkan Paskarina (2005) bahwa ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Hal ini karena, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Untuk itu agar partisipasi dapat menjadi daya dorong bagi pelaksanaan pembangunan, maka perlu diatur dengan peraturan yang bersifat mengikat atas kelembagaan partisipasi tersebut, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Selanjutnya, pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD ini seluruh masukan dan saran hasil musrenbang menjadi masukan utama dalam memperbaiki rancangan RPJMD sebelum tersusun menjadi rancangan akhir RKPD. Proses penyusunan rancangan akhir dilakukan oleh Tim asistensi dan Bappeda serta dengan mengkoordinasikan kepada OPD. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perumusan sasaran, program dan penetapan target sasaran.

Tantangan sinergitas antar pemangku kepentingan pada penyusunan rancangan akhir hanya berlangsung antara Tim Penyusun dengan pemangku kepentingan dari unsur OPD. Sementara, tantangan lainnya bahwa unsur dunia usaha/swasta dan masyarakat tidak terlibat, hal ini sangat disayangkan karena kesepahaman (sinergi) antar pemangku kepentingan pada tahap ini sangat diperlukan, untuk mengetahui konsistensi dari saran dan masukan yang dihasilkan saat diskusi mulai dari perumusan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, kebijakan dan program dari semua tahapan penyusunan rencana.

Tantangan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan diakui masih belum sepenuhnya menjamin terjadinya sinergi, hal ini disebabkan karena Peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan RPJMD mengedepankan pendekatan teknokratis daripada partisipatif.

Pada proses penyusunan RPJMD tantangan sinergitas antar pemangku kepentingan terjadi pada penyusunan renstra dan renja SKPD, pramusrenbang dan musrenbang. Namun sinergitas secara maksimal terjadi pada saat pelaksanaan pramusrenbang (perumusan visi, misi dan nilai-nilai), hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara terhadap pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa unsur identitas pada RPJMD dapat mendorong terjadinya sinergitas antar pemangku kepentingan.

Partisipasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD mempunyai tingkat partisipasi yang berbeda, dimana kesempatan partisipasi unsur pemerintah lebih besar daripada unsur masyarakat dan dunia usaha. Faktor keragaman masyarakat belum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD. Dari indikator keragaman yang digunakan, hanya keragaman berdasarkan heterogenitas profesi, sedangkan heterogenitas jenis kelamin dan pluralitas belum menjadi pertimbangan. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan. Berbagai tantangan sinergitas ini hendaknya akan menjadi perhatian Pemkab Bangkalan agar proses perencanaan pembangunan semakin lebih baik.

Terkait tantangan akibat pandemi maka Pemkab Bangkalan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2021. Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) telah disusun guna memaksimalkan target dan sasaran dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron menyebut bahwa rancangan P-APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021 merupakan wujud refleksi dan aktivitas yang direncanakan dalam rangka mencapai target kinerja di sisa tahun 2021. Bupati perlu melakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah," ungkap Bupati Ra Latif kepada SURYA, Minggu (19/9/2021).

Sebelumnya, Penyampaian Nota Pengantar P-APBD Bangkalan Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan Ra Latif di hadapan anggota DPRD Bangkalan dalam rapat paripurna, Jumat (17/9/2021). Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Bangkalan telah menyusun kebijakan pembangunan secara jelas yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 yang menjadi dasar penyusunan P-APBD 2021.

Pada rangkaian proses terjadinya perubahan APBD maka TPPD memberikan sejumlah strategi yang bisa dilakukan Pemkab Bangkalan, meliputi:

A. Mengurangi belanja pegawai:

1. Mengurangi belanja pegawai sesuai dengan mandatory dari Pemerintah Pusat
2. Perlu dilakukan perampingan organisasi di Pemkab Bangkalan agar ada pengurangan jabatan struktural, sehingga akan ada belanja pegawai yang dikurangi
3. Perlu ada Peraturan Bupati untuk mengatur masa kerja THK dan pegawai kontrak
4. Menetapkan umur tenaga honorer pada usia 56 tahun
5. Meminimalisir dan mengurangi tenaga kontrak yang ada di Pemkab sehingga belanja daerah untuk pegawai dan barang-jasa bisa lebih rendah

B. Peningkatan Belanja Modal

1. Perlu ada peningkatan sumber pendapatan daerah, utamanya dari pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah
2. Potensi daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Potensi utama adalah pariwisata dan menggali potensi baru lainnya yang disesuaikan dengan tat ruang
3. Perlu dilakukan pemberdayaan aset daerah yang ada agar lebih optimal

4. Perlu ada forum investasi di Kabupaten Bangkalan untuk mendorong investor dari luar dan dalam daerah agar ikut membangun Bangkalan.

4.3. Mengelola Tantangan Penanganan Covid-19

Penanganan covid-19 menjadi tantangan serius Pemkab Bangkalan di tahun 2021. Kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan melonjak usai libur Lebaran 2021 selama sepekan. Data menunjukkan per Minggu (6/6/2021), terdapat 25 kasus Covid-19 dan terdapat dua pasien Covid-19 meninggal dunia. Sebelumnya, pada Kamis (3/6/2021) terdapat 7 kasus baru Covid-19, 5 kasus pada Jumat (4/6/2021) dan 4 kasus pada Sabtu (5/6/2021).

Merujuk data berita online Kontan.co.id, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan Agus Sugianto Zain menyampaikan bahwa penambahan kasus hari Minggu merupakan yang terbesar usai libur Lebaran. Agus menyebut, penyebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan diduga karena adanya budaya Lebaran Ketupat. Tradisi ini selalu dilakukan masyarakat Bangkalan meski pandemi Covid-19 belum usai. Budaya Lebaran Ketupat yang kemudian dipengaruhi juga oleh banyaknya PMI (pekerja migran Indonesia) yang pulang ke Jawa Timur, mayoritas berasal dari Bangkalan. Jadi, indikator ini yang diduga jadi penyebab. Jadi, ada kluster keluarga dan transmisi lokal yang penyebab melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan.

Butuh kerja ekstra untuk memberi kesadaran agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, jumlah SDM di Bangkalan juga terbatas serta postur APBD untuk penanganan Covid-19 juga minim beda jauh dengan Surabaya. Masih banyak masyarakat yang menganggap kebal dengan virus corona hingga abai dengan protokol kesehatan, serta mengabaikan kondisi kesehatan mereka sendiri. Hal ini menyangkut perilaku, tentang nilai-nilai kesehatan. Artinya ketika sakit parah, masyarakat baru datang ke rumah sakit.

Imbas dari melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan, dua fasilitas pelayanan kesehatan di Bangkalan, yakni Puskesmas Arosbaya dan Puskesmas Tongguh ditutup. Hal itu dikarenakan terdapat 29 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tersebut terjangkit Covid-19. Beberapa tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 meninggal dunia.

Usai libur Lebaran, kasus Covid-19 tertinggi di Bangkalan terjadi di Kecamatan Arosbaya dan saat ini berstatus zona merah Covid-19. Namun, di 17 kecamatan lain di Bangkalan, kasus Covid-19 masih terkendali. Kecamatan Arosbaya ini memang tinggi masyarakat yang terpapar virus Covid-19 ini, akumulasi pasca libur Lebaran kemarin karena memang tradisi kumpul keluarga, kemudian dipengaruhi juga oleh PMI yang datang ke kampungnya, kini paling tinggi Bangkalan di Arosbaya.

Pemkab Bangkalan dibantu Pemprov Jatim melakukan swab dan tracing di lapangan. Masyarakat diharapkan bersedia mengikuti semua anjuran pemerintah agar kasus Covid-19 di Bangkalan bisa ditekan dan tidak meluas. Tadi tim dari provinsi itu langsung ke lapangan melakukan swab dan tracing ke Arosbaya. Yang awalnya mereka menolak, sekarang sudah bersedia di-swab.

Per hari Minggu (6/6/2021), ada 25 kasus pasien baru yang positif Covid-19, kemudian 2 pasien Covid-19 meninggal, dan 17 orang dinyatakan suspek corona. Berdasarkan data akumulatif per tanggal 6 Juni 2021, jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Bangkalan sebanyak 1.779 orang. Kemudian, jumlah pasien sembuh 1.520 orang, pasien Covid-19 meninggal 180 orang, dan kasus Covid-19 aktif 79 orang.

Bupati R. Abdul Latif Amin Imron menyebut bahwa kasus Covid-19 di Bangkalan mengalami peningkatan cukup tinggi dalam beberapa waktu belakangan. Peningkatan tertinggi terjadi di 4 kecamatan, Satgas Covid-19 daerah mencatat kenaikan kasus konfirmasi positif dari 12 kasus menjadi total 322. Pasien Covid-19 tertinggi ada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Arosbaya, Klampis, Geger dan Kecamatan Kota (Selasa, 8 Juni 2021).

Terkait hal ini, Kabupaten Bangkalan telah menyiapkan 178 tenaga medis dan 121 tenaga vaksinator serta penambahan ruang dan tempat tidur untuk pasien Covid-19. Sebanyak 150 tempat tidur di RSUD Syarif Ambami Ratoh Ebu yang saat ini terpakai 93 pasien, 74 tempat di Balai Diklat terpakai 35 dan di Balai Latihan Kerja (BLK) 30 tempat tidur terpakai 17 pasien OTG. Untuk penyekatan masih diberlakukan di wilayah Arosbaya, di penyeberangan Kamal dan akses masuk Suramadu sisi Madura.

Kabupaten Bangkalan berubah status dari zona oranye menjadi zona merah penyebaran Covid-19 per Selasa (15/6/2021) lalu. Saat itu penyebaran Covid-19 dianggap masif, ditandai dengan penambahan kasus harian yang sangat tinggi. Bahkan kebijakan penyekatan diberlakukan di seluruh pintu masuk Bangkalan dari Jembatan Suramadu hingga penyeberangan Ujung - Kamal. Kebijakan penyekatan tersebut sempat diprotes kelompok warga Bangkalan karena dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif.

Pada perkembangan selanjutnya (akhir Juni 2021) Kabupaten Bangkalan tidak lagi berstatus zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penyebaran Covid-19. Per Selasa (29/6/2021), Bangkalan sudah berubah menjadi zona oranye, atau daerah dengan risiko sedang penyebaran Covid-19. Hal ini menunjukkan PemKab Bangkalan mampu mengelola tantangan covid-19 ini dengan baik, sehingga di masa mendatang akan semakin resisten.

Tantangan covid-19 pada akhirnya bisa dikelola dengan baik oleh PemKab Bangkalan bersinergi dengan PemProv Jatim dan PemKot Surabaya dan semua pihak lain terkait. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Makhyar Jibril Alfarabi membenarkan jika Bangkalan berubah status menjadi zona oranye per Selasa kemarin. Alhamdulillah pasca intervensi yang masif di Bangkalan, per kemarin sudah berubah menjadi zona orange (Kontan.co.id, 30/6/2021).

Menurut Jibril, PPKM mikro hingga penambahan RS Intervensi yang dimaksud adalah bentuk penerapan PPKM Mikro secara ketat untuk

membatasi mobilitas warga, penambahan Rumah Sakit Darurat Lapangan hingga penambahan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien bergejala. Syarat wajibnya, warga Bangkalan tidak boleh lengah dengan perubahan status tersebut, sehingga warga harus tetap taat protokol kesehatan. Sejak berubah menjadi zona oranye, jumlah kasus Covid-19 di Bangkalan tercatat 3.467 kasus, 2.127 kasus di antaranya sembuh, 324 pasien meninggal, dan 1.016 kasus masih dirawat.

Pemkab Bangkalan perlu mengelola tantangan pandemi ini secara bijak dan hati-hati. Bupati memberikan penjelasan bahwa memperhatikan dinamika sosial masyarakat selama masa pandemi Covid-19, maka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik kami tetapkan sebagai tema pembangunan Tahun Anggaran 2021. Keputusan menggelorakan tema pembangunan itu tidak lepas dari menurunnya pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sejak pandemi Covid-19 menerjang Bangkalan mulai awal semester 2020 hingga saat ini. Kondisi itu tentu berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan daerah yang menyeret terjadinya perubahan perkembangan dan tatanan sosial ekonomi masyarakat Bangkalan. Kondisinya semakin pelik ketika terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang berdampak tidak menguntungkan bagi pemda, seiring cepatnya penyebaran Covid-19 di Bangkalan.

Bupati menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi maka sektor pajak sebagai pos penerimaan negara tidak mencapai target. Imbasnya yakni kebijakan pengurangan dan penundaan transfer Dana Perimbangan kepada daerah. Bupati Ra Latif sebagai Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Bangkalan kini mulai bernafas lega ketika upaya maksimal bersama Forkopimda setempat telah menurunkan angka penyebaran kasus Corona di Bangkalan. Hingga Minggu (19/9/2021), kasus penularan baru pada Status Terkini Covid-19 Kabupaten Bangkalan menunjukkan 4 orang dengan rincian 3 orang kontak dan 1 orang lainnya dinyatakan bergejala.

Bahkan sehari sebelumnya, tercatat nol kasus penularan baru. Hal ini dipengaruhi semakin masifnya vaksinasi yang dilakukan sehingga terbentuk herd immunity, sehingga TPPD optimis bahwa Pemkab Bangkalan bisa melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi daerah.

Beberapa prioritas pembangunan pun telah ditetapkan sebagai pelecut suksesnya upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seperti pemulihan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah, pembangunan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Pemkab Bangkalan akan berupaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bermartabat melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi.

Status terkini Covid-19 di Kabupaten Bangkalan meski dalam kondisi waspada namun menunjukkan tren cukup melegakan. Dalam periode 13-19 September 2021, kasus baru atau penularan berada di bawah angka 10 orang, bahkan angka kematian akibat Corona selama periode itu tercatat nol kasus. Hal ini berlangsung hingga update akhir Desember 2021 maka tercatat nol kasus.

4.4. Mengelola Tantangan Pariwisata dan Industri

4.4.1. Pariwisata

Kabupaten Bangkalan memiliki hampir semua persyaratan sebagai destinasi unggulan, tetapi sampai saat ini pengembangan pariwisata masih belum menjadi pilihan utama wisatawan. Posisi geostrategis Kabupaten Bangkalan belum secara maksimal membawa pengaruh kepada kedatangan wisatawan, karena dari aspek aksesibilitas obyek wisata di Bangkalan relatif masih “sulit” dicapai. Walaupun selalu terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangkalan (sebelum pandemi), tetapi

jumlah tersebut masih sangat sedikit dibanding wilayah lainnya di Madura, terutama Sumenep.

Dari aspek atraksi dan amenitas, Kabupaten Bangkalan memiliki daya tarik wisata yang lengkap yaitu obyek wisata alam, budaya dan buatan manusia, tetapi belum semua obyek wisata tersebut didukung prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. Produk wisata yang dikenal dengan 3 A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) merupakan suatu sistem, dimana satu sama lain saling berkaitan, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang terpadu antar produk tersebut.

Sebagai suatu sistem yang kompleks, maka, pariwisata adalah industri jasa yang mempunyai karakteristik unik multidimensional (multi sektor, multi aktor, multi region dan multi aspek). Karakter pariwisata yang multidimensional tersebut menyebabkan sektor ini sangat tergantung pada keterpaduan pengelolaan agar terselenggaranya tujuan pembangunan pariwisata yang diinginkan.

Sehubungan dengan karakter tersebut, laporan ini menganalisis pendekatan perencanaan pembangunan pariwisata dan kelembagaan yang sesuai untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Perumusan perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik-holistik kiranya sangat tepat untuk sektor pariwisata. Dari sisi pengembangan kelembagaan, maka pendekatan kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) sangat dibutuhkan dalam membangun pariwisata di Bangkalan.

Walaupun masih terbatas kepada 12 OPD, namun ke depan hal ini akan dikembangkan lagi sehingga sebagian besar OPD akan berada dalam lingkup kolaborasi. Soal bentuk kolaborasi, dapat dicontohkan: Dinas PUPR bisa turut memproyeksikan akses jalan menuju lokasi wisata, Dinas Koperasi dan UKM memberikan pelatihan kerajinan bagi para pelaku wisata, dan Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya edukasi terkait standar kesehatan serta pencegahan Covid-19 di lokasi wisata dan lainnya. Dengan

sebuah sinergi dan kolaborasi bersama untuk konvergensi ini kami optimis gerak laju pariwisata di Bangkalan akan lebih cepat.

Adanya pandemi Covid-19 memang sangat berdampak pada sektor pariwisata. Meski demikian, sejak diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru mulai kembali bergeliat. Hal itu terlihat dari kian meningkatnya kunjungan wisata, baik di objek wisata yang dikelola Pemkab maupun mandiri. Tren kunjungan ke tempat wisata saat ini sudah mulai naik. Volume kenaikan sudah mulai terjadi dari bulan Juli.

Jika kita menyimak trend saat ini maka sekarang ini desa wisata menjadi salah satu primadona desa membangun dirinya. Alasannya adalah: *Pertama*, karena desa wisata menawarkan suguhan panorama alami yang menyejukkan bagi siapapun yang melihatnya. Pemandangan ini jelas kontras dengan keseharian kehidupan perkotaan yang dipenuhi gedung-gedung dan asap kendaraan. Desa wisata menawarkan suasana yang selalu dirindukan warga kota yang notabene sebagian besar berasal dari desa. Kebutuhan bernostalgia selalu mendorong mereka pergi ke desa berwisata. *Kedua*, suasana alami desa tidak tergantikan oleh bangunan apapun. Suasana alam yang merupakan anugerah Tuhan adalah fakta yang tak bisa dibantah. Meski wisata modern terus membahana seperti taman bermain lengkap dengan roller coaster-nya sekalipun, tetap saja suasana alami desa memiliki magnet ajaib yang membuat para wisatawan betah berada di sana. *Ketiga*, keramahan sikap warga desa terhadap para wisatawan adalah faktor kemanusiaan yang tak lagi ditemui di kota. Bertegur sapa dengan warga desa yang ramah dan tulus membuat orang mendapatkan energi psikologi yang positif sehingga bisa menghilangkan tekanan-tekanan psikologi yang dirasakan orang dalam kehidupan sehari-hari di kota. *Keempat*, berwisata ke desa wisata mengandung banyak sekali materi edukasi bagi siapapun terutama anak-anak. Di desa anak-anak bisa melihat tumbuhan yang secara alami tumbuh berkembang, anak-anak bisa menikmati kejernihan air sungai dan menikmati mandi di sungai. Anak-anak juga bisa melihat bagaimana binatang ternak berdampingan hidup dengan

manusia secara saling menguntungkan. Dalam konteks seperti ini akhirnya mengunjungi kandang sapi atau memandikan sapi sama sekali bukan hal yang menjijikkan bagi mereka. Pendidikan anak yang paling utama ketika berada di desa adalah mengenai budi pekerti. Sambutan warga yang ramah dan tulus dengan bahasa yang halus membuat mereka belajar betapa penting sikap menghargai orang lain dan alam. Interaksi sosial yang hangat itu akan berpengaruh positif bagi psikologi anak yang sekarang ini dijejali berbagai aksentuasi modernitas yang sebagian besar berefek negatif bagi kondisi psikologi mereka seperti menghabiskan waktu bermain game sehingga tidak melakukan relasi sosial dengan lingkungan dan sebagainya.

Desa-desa di Indonesia terus menggeliat berkreasi dan berinovasi. Apalagi setelah digelontor Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang lumayan banyak. Tak berlebihan desa berlomba-lomba menciptakan inovasi maupun kreativitas. Salah satu yang kini getol dilakukan desa-desa di Jawa Timur itu antara lain desa wisata. Termasuk praktik baik Desa Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menciptakan desa wisata dengan nama Dewi Cemara singkatan dari Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera. Bentuk best practices ini tentunya bisa diduplikasi di wilayah kabupaten Bangkalan. Hal ini tentunya menjadi upaya baik PemKab Bangkalan untuk mengelola tantangan di sektor pariwisata.

Upaya pembangunan kepariwisataan di Bangkalan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 telah menetapkan 37 program/kegiatan, diantaranya adalah program **DEWI CEMARA** (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri dan Sejahtera), dengan sumber dana dari APBN, APBD dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

Adapun kriteria Dewi Cemara, meliputi:

1. Desa yang mempunyai destinasi wisata yang unik dan menarik dengan *Attraction*, *Access*, dan *Accommodation* (3A) yang memenuhi Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) berbasis masyarakat.

2. Desa yang mempunyai industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal, yang berdaya saing dengan harga terjangkau
3. Desa yang mempunyai citra positif yang mendukung pemasaran
Desa yang mempunyai kelembagaan yang kuat berupa: (1) sinergi aturan main formal dan informal; (2) komitmen dan kerjasama stakeholder lintas sektor dan lintas wilayah; dan (3) stakeholder yang sadar wisata.

Program Dewi Cemara ke depan bisa digarap di kabupaten Bangkalan dengan desa wisata budidaya sapi Madura. Melalui manajemen yang tepat diharapkan Bangkalan dapat menjadi swasembada daging bahkan impor ke luar negeri. Hilirasi industri lewat pengolahan protein hewani. Format-format nilai tambah dari hilirasasi itu yang terus kita kembangkan ini berguna untuk empersempit ketimpangan kota dan desa itu juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur.

Bangkalan sebagai bagian dari Pulau Madura dan Provinsi Jawa Timur, secara ekonomi termasuk daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, penting sekali sektor kepariwisataan di Bangkalan digarap dengan harapan dapat menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi pariwisata di Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Potensi Ekonomi Pariwisata di Bangkalan Tahun 2019

Jumlah Potensi Desa Wisata (Desa)	Jumlah DTW (lokasi)	Jumlah Pengunjung DTW (Orang)	Potensi Ekonomi (Rp)	Potensi PAD (Rp)
39	20	1.851.956	343.284.090.000	12.475.328.200

Upaya untuk memperkuat pariwisata Bangkalan perlu terus dilakukan pemerintah kabupaten Bangkalan. Dengan Percepatan Pembangunan, Pariwisata Bangkalan akan bangkit dan terus digelorakan untuk kemajuan daerah. Upaya memperkuat pariwisata Bangkalan akan lebih menggembirakan lagi bila diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif.

Syarat berkembangnya ekonomi kreatif di Bangkalan sudah begitu banyak. Sudah terdapat komunitas fotografer, pemusik, aneka kuliner khas, kain batik Tanjung Bumi, dan lain-lain. Selaras dengan target Pemerintah Bangkalan untuk percepatan pembangunan pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak lagi kunjungan wisatawan. Industri yang bergerak di jalur ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi poros ekonomi Bangkalan di masa mendatang.

Pemkab Bangkalan sudah berkomitmen untuk melakukan promosi terkait potensi wisata di Bangkalan. Diharapkan ekonomi kreatif juga dikembangkan satu paket mengikuti geliat pariwisata. Berikut inventarisasi potensi ekonomi kreatif yang ada di kabupaten Bangkalan.

Tabel 4.1. Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bangkalan

No	Sub Sektor	Usaha Ekonomi Kreatif
1	Aplikasi dan pengembangan permainan	Solite Studio
2	Arsitektur	Rumah kuno (Tanean lanjhang), rumah modern (G Project Home design, Zilidansy, Zhalzzabila, dll)
3	Desain Produk	Nibra's house, PT. Devri Art Production, Mahar pernikahan, dll
4	Fesyen	Bordir (Tretan, Salsabila), Konveksi (Baju koko, hijab, dll)
5	Desain Interior	Yenadi design, Meubel Lisa Jaya
6	Desain Komunikasi Visual	Desain grafis (Hikari, Avicenna, dll)
7	Seni Pertunjukan	Kerapan Sapi, Sandur Sapo Angen Teratas Madura (Socah), Teater Pangeran Tengah, dll
8	Film, Animasi dan Video	Studio Ahfa Record & Ahfa Pictures, Viearts Studio
9	Fotografi	Saerah Foto Studio, Aulia, Bangkalan Fotografi Club
10	Kriya	Cakraningrat Ship Model (Miniatur kapal), Kriya tekstil (batik tanjung bumi, Patengteng), Pecut, tali Agel
11	Kuliner	Bebek, Soto, Sate, Rujak, Tajin Sobih, Siwil, dll
12	Musik	Adipoday music studio, Lydian Harmonic course, Bima music center, Daul Andas Blega, Assyifanada, dll
13	Penerbitan	Amanah, Masterprint, Duta Unit, dll
14	Periklanan	Radar Madura, Gerbang Pulau Madura
15	Seni rupa	Komunitas Masyarakat Lumpur (KML): Chairul Anwar, Syah-Han, Joe, Anwar Sadat, Edy Art, Roz Ekki, Yudi Metrix, Irza Nova Husna
16	Televisi dan Radio	Madura TV, Radio (Suara Bangkalan, Gita Segara, Radar Madura Radio)

Sumber: Data Primer (Ningsih dan Purwanto, 2019)

Merujuk pada tabel 1 maka dapat dikatakan bahwa potensi 16 subsektor ekonomi kreatif tersedia dan prospek untuk terus dikembangkan. Misalnya,

subsektor aplikasi game yang dikembangkan sejumlah anak kreatif dari Solite Studio Bangkalan ini sudah berulang kali menjuarai berbagai event kejuaraan game. Salah satunya, tim Solite meraih Juara Kedua dalam Imagine Cup 2013 Worldwide Finals yang diselenggarakan di St. Petersburg, Russia pada tanggal 8-12 Juli 2013. Tentunya, prestasi ini cukup positif dan diharapkan dapat diikuti subsektor lainnya dalam rangka mendorong geliat ekonomi Bangkalan.

Agar geliat ekonomi kreatif bisa tumbuh secara konsisten, Pemerintah Daerah Bangkalan perlu meningkatkan komitmennya untuk membuka akses ke tempat terpencil. Ke depan harus kita upayakan tidak ada lagi wilayah “blank spot” atau wilayah yang susah untuk dijangkau. Tentunya ini membutuhkan komitmen membangun dari Pemerintah Daerah dan multipihak di Bangkalan.

Pemerintah Bangkalan bersama Koperasi, UKM atau BUMDes perlu memberikan ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif disesuaikan dengan potensi yang dimiliki setiap desa. Potensi-potensi inilah yang diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dapat memajukan dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif.

Koperasi, UKM atau BUMDes diharapkan dapat menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi kreatif yang dikelola oleh desa dan kerjasama antardesa. Pelatihan ekonomi kreatif bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa melalui ekonomi kreatif,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kreatif,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa berbasis ekonomi kreatif,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
- h. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- i. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selain memberikan regulasi dan stimulus pada pelaku ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki program event pada setiap tahunnya dengan tujuan memberikan ekosistem, peluang dan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk unggulan dan memasarkannya pada khlayak umum. Berikut adalah beberapa event yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Bangkalan demi mendukung ekonomi kreatif:

1. Festival makanan khas Kabupaten Bangkalan
2. Festival jajanan khas Kabupaten Bangkalan
3. Festival Tera' Bulan
4. Festival Rokatan
5. Pagelaran Kesenian Bangkalan
6. Cultural Carnival
7. Festival Rujak Bangkalan
8. Festival Batik
9. Kerapan Sapi Carter
10. Festival 1001 Menu Bebek
11. Kerapan Sapi Tradisional.

Sementara itu, potensi pariwisata di masa mendatang adalah wisata hala. Kementerian Pariwisata menunjuk beberapa provinsi sebagai destinasi wisata halal yaitu: Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang dipersiapkan menjadi destinasi wisata halal (Kurniawan et al., 2019). Jawa Timur sebagai salah satu provinsi destinasi wisata halal mempunyai banyak potensi wisata di masing-masing wilayah. Pemerintah berencana membangun pusat ekonomi syariah di Jawa Timur yang akan diberi nama Islamic Science Park (ISP). Pembangunan Islamic Science Park ini direncanakan bisa dimulai pada

tahun depan yang berlokasi di Bangkalan-Madura, Jawa Timur. Konsep Islamic science park ini. Posisinya 20% untuk education, 30% untuk art, dan 50% untuk entertainment. Ini menjadi bagian yang terintegrasi antara semua konten *islamic science park* di kaki pulau Madura.

Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang masuk pulau Madura mempunyai potensi besar dalam mengembangkan wisata, dengan adanya sumber daya alam yang memadai serta di support dengan adanya Makam Syaikhona Cholil sebagai rujukan tempat destinasi wisata religi yang mendatangkan para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Konsep wisata halal merupakan tren baru dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. TPPD mendorong agar Pemkab Bangkalan konsen pada pengembangan wisata halal. Terlebih di kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mulai akhir 2021 sudah ada Halal Center, sehingga dapat dijadikan mitra strategis dalam pengembangan wisata halal.

Hasil penelitian Faraby dan Rozi (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan siap bilamana konsep wisata halal benar-benar diterapkan, melihat potensi dari variable penunjang yang terdiri dari (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Kelembagaan) namun memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan dibenahi dengan ditunjang adanya SK Gubernur bahwa di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata Halal serta komitmen dan sinergi Tokoh Masyarakat, Kyai dari pimpinan daerah dalam menjadikan Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata halal.

4.4.2. Industri

Kebijakan industri menjadi salah satu prioritas penting Pemkab Bangkalan dalam rangka mengelola tantangan pembangunan daerah. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pada hari Selasa (7/12/2021) sejumlah pimpinan OPD mendampingi Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Hotel Century Park Jakarta, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

Rakor dipimpin langsung Plt Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr Ir Abdul Kamarzuki, MPM itu membahas dua RDTR; yaitu RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Akses Suramadu dan RDTR WP Burneh yang meliputi: Kecamatan Burneh, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Tragah. Arah pengembangan dari RDTR akses Suramadu adalah mewujudkan kawasan akses sepanjang 12 KM itu sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Dengan kegiatan utama adalah sektor industri, perdagangan jasa, dan permukiman. Persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN adalah satu tahapan yang harus dilalui Pemkab Bangkalan dalam proses penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

RDTR yang ditetapkan nanti akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Sehingga setelah Peraturan Bupati (Perbup) ditetapkan, Pemkab Bangkalan bisa menyajikan sistem informasi tata ruang serta kemudahan dalam percepatan investasi dan pembangunan di wilayah tersebut. Harapan kami setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR/BPN, kami akan membuat PerBup dilanjutkan masuk ke OSS. Ketika calon investor mau membangun dan mendaftar melalui OSS, koridor-koridor yang telah kami siapkan sudah muncul.

Kawasan strategis ekonomi pada RDTR Burneh juga mengakomodir kegiatan ekonomi masyarakat seiring dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi kerakyatan seperti Galeri Batik, usaha kuliner tradisional. "Kami juga mempertahankan potensi-potensi lokal, salah satunya menjaga wilayah Burneh sebagai lumbung pangan Bangkalan.

Seperti diketahui, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya. Akses Suramadu yang disebut sebagai Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) diproyeksikan sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. Sesuai dengan perencanaan WPS 13, kawasan akses Suramadu akan terintegrasi dengan pelabuhan internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis.

Berdasarkan Pra Feasibility Study (Pra FS) atau Studi Kelayakan Awal yang dilakukan Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan yang berlokasi di kawasan lepas pantai Kecamatan Klampis mempunyai kedalaman 18 mean Low Water Spring (mLWS).

Diperkirakan, kapasitas Pelabuhan Tanjung Bulupandan mencapai 2,7 juta teus dan didukung dengan kawasan industri dan pergudangan. Dengan demikian, pemerintah pusat memproyeksikan Tanjung Bulupandan sebagai Kota Pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi dan gerbang arus ekspor-impor barang dan jasa di Jawa Timur.

Mengingat, Pelabuhan Tanjung Perak sudah crowded. Kapasitasnya rata-rata hanya dapat melayani sekitar 30.000 kapal per tahun. Sedangkan pertumbuhan kapal periode 2011-2013 naik menjadi 40.000 kapal per tahunnya. Begitu juga dengan Teluk Lamong, Kabupaten Gresik. Pelabuhan yang diresmikan pada 2014 di atas lahan seluas 50 hektare itu hanya memiliki kedalaman 16 Mean Low Water Springs (mLWS) dan berkapasitas 1 juta teus.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan, Eko Setyawan, RDTR merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang prinsipnya menjadi salah satu pendukung keberadaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Nanti arahnya

akan disinkronkan dengan Perpres 80. Saat ini RTRW Kabupaten Bangkalan tengah proses direvisi atau peninjauan ulang untuk penyesuaian tata ruang.

Kekuatan finansial dan jaringan dari pengelola Kawasan industri menjadi tantangan terbesar dalam membangun kawasan industri. Pasalnya, kawasan industri biasanya akan diisi oleh pabrik-pabrik penghiliran. Menurut Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito, dalam membangun kawasan industri yang ideal memang membutuhkan waktu panjang. Tantangan secara umum adalah dari segi [kekuatan] finansial dan jaringan serta harus sabar. Tidak bisa [membangun kawasan industri] hanya sehari atau 2 hari, bisa 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan 15 tahun. Perlu perencanaan strategis pada pengelolanya (Bisnis.com, 13/12/2019).

Dalam rangka kunjungan kerja ke kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Kendal maka TPPD memberikan catatan beberapa hal kepada Bupati Bangkalan, bahwa Bupati perlu: a. Menyusun Rencana Induk Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); b. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; c. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; d. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; e. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK; f. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; g. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam hal pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK.



5.1. Kesimpulan

5.1.1. Mengelola Tantangan Pembangunan Daerah

Upaya Pemkab Bangkalan dalam mengelola pembangunan daerah sudah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memprioritaskan empat poin pembangunan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun anggaran 2021. Empat poin itu dirangkum dalam tema “pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan industri, pariwisata dan investasi didorong oleh penguatan sumberdaya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Terkait tantangan akibat pandemi maka Pemkab Bangkalan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2021. Pada rangkaian proses terjadinya perubahan APBD maka TPPD memberikan sejumlah strategi yang bisa dilakukan Pemkab Bangkalan, meliputi:

A. Mengurangi belanja pegawai:

1. Mengurangi belanja pegawai sesuai dengan mandatory dari Pemerintah Pusat
2. Perlu dilakukan perampingan organisasi di Pemkab Bangkalan agar ada pengurangan jabatan struktural , sehingga akan ada belanja pegawai yang dikurangi
3. Perlu ada Peraturan Bupati untuk mengatur masa kerja THK dan pegawai kontrak
4. Menetapkan umur tenaga honorer pada usia 56 tahun
5. Meminimalisir dan mengurangi tenaga kontrak yang ada di Pemkab sehingga belanja daerah untuk pegawai dan barang-jasa bisa lebih rendah

B. Peningkatan Belanja Modal

1. Perlu ada peningkatan sumber pendapatan daerah, utamanya dari pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah
2. Potensi daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Potensi utama adalah pariwisata dan menggali potensi baru lainnya yang disesuaikan dengan tat ruang
3. Perlu dilakukan pemberdayaan aset daerah yang ada
4. Perlu ada forum investasi di Kabupaten Bangkalan untuk mendorong investor dari luar dan dalam daerah agar ikut membangun Bangkalan.

5.1.2. Mengelola Tantangan Penanganan Covid 19

Upaya PemKab Bangkalan dalam mengelola penanganan covid-19 membuahkan hasil. Akibat semakin masifnya vaksinasi yang dilakukan sehingga terbentuk herd immunity, sehingga TPPD optimis bahwa PemKab Bangkalan bisa melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi daerah. Beberapa prioritas pembangunan pun telah ditetapkan sebagai pelecute suksesnya upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seperti pemulihan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah, pembangunan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.

5.1.3. Mengelola Tantangan Pariwisata dan Industri

Perumusan perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik-holistik kiranya sangat tepat untuk sektor pariwisata. Dari sisi pengembangan kelembagaan, maka pendekatan kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) sangat dibutuhkan dalam membangun pariwisata di Bangkalan. Adanya pandemi Covid-19 memang sangat berdampak pada sektor pariwisata. Meski demikian, sejak diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru mulai kembali bergeliat. Hal itu terlihat dari kian meningkatnya kunjungan wisata, baik di objek wisata yang dikelola Pemkab maupun mandiri. Tren kunjungan ke

tempat wisata saat ini sudah mulai naik. Volume kenaikan sudah mulai terjadi dari bulan Juli 2021. TPPD Bangkalan memberi catatan bahwa:

- a. Jika kita menyimak trend saat ini maka sekarang ini desa wisata menjadi salah satu primadona desa membangun dirinya.
- b. Pemkab Bangkalan sudah berkomitmen untuk melakukan promosi terkait potensi wisata di Bangkalan. Diharapkan ekonomi kreatif juga dikembangkan satu paket mengikuti geliat pariwisata. Alasannya, Bangkalan mempunyai potensi 16 subsektor ekonomi kreatif tersedia dan prospek untuk terus dikembangkan.
- c. Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang masuk pulau Madura mempunyai potensi besar dalam mengembangkan wisata halal.

Terakhir, kebijakan industri menjadi salah satu prioritas penting Pemkab Bangkalan dalam rangka mengelola tantangan pembangunan daerah. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019. TPPD Bangkalan melihat bahwa prospek pengembangan industri di Bangkalan semakin cerah, sehingga ke depan kebijakan perencanaan industri menjadi kebutuhan yang prioritas.

5.2. Rekomendasi

TPPD dalam prosesnya sangat mengapresiasi dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sehingga semua kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Catatan dari berbagai kegiatan rapat dan diskusi TPPD memperlihatkan adanya irisan prioritas. Hal ini menjadi masukan bagi TPPD untuk merancang kegiatan lebih lanjut di kabupaten Bangkalan, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. TPPD memberikan catatan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemkab Bangkalan harus terus memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk berkreativitas dalam usaha membangun desa wisata atau dalam konsep dewi cemara.

2. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat di desa wisata perlu berkesinambungan dan terus menerus namun tetap melakukan tahap monitoring dan evaluasi sehingga tidak berjalan stagnan.
3. Masyarakat dituntut lebih proaktif dalam rangka mengapresiasi diri agar keluar dari kemiskinan dan pengangguran melalui kerja nyata di lingkungan sendiri.
4. Pemkab Bangkalan perlu intensif mengawal program yang telah dicanangkan hingga sampai kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif, sehingga masyarakat pelaku ekonomi kreatif dapat menerima manfaat dari setiap program yang direncanakan oleh pemerintah.
5. Fesyen(batik, konveksi), kuliner dan kriya (kerajinan) menjadi sub sektor pengembangan industri kreatif unggulan di Bangkalan yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* kepada kegiatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif diharapkan dapat tumbuh dan berkembang seperti yang menjadi tujuan setiap program pemerintah.
6. Pemkab Bangkalan perlu segera membuat rencana induk pengembangan ekonomi kreatif agar lebih jelas proses dan pentahapannya. Diharapkan multipihak bisa berperan dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di kabupaten Bangkalan.
7. Adanya konseptualisasi wisata halal yang jelas untuk pengembangan wisata halal yang berkelanjutan. b. Pemerintah provinsi segera menerbitkan peraturan daerah mengenai konsep pariwisata halal. c. Menentukan strategi untuk promosi dan sosialisasi yang melibatkan semua kalangan stakeholders secara terintegrasi melalui seminar atau workshop. d. Sinergi dengan semua pihak yang memiliki perhatian di bidang kepariwisataan, Peningkatan keahlian SDM. f. Percepatan pembangunan sarana transportasi dan memperbaiki akses informasi untuk mempermudah wisatawan.
8. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus maka Bupati perlu untuk: a. Menyusun Rencana Induk Daerah Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK); b. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; c. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; d. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; e. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK; f. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; g. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam hal pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK.



Buku:

- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Effendi, Bachtar, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan, Yogyakarta, Uhaindo dan Offset.
- Hadiawan, Agus. 2006. Teori Pembangunan, Buku Ajar. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Nazir, Moh, Ph.D. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Stiglitz, Joseph. 2000. Globalization and its Discontent, Penguin Books, London.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Suparmoko dan Irawan. 1996. Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam. Yogyakarta : BPFE
- BPS Jatim, 2021, Jawa Timur Dalam Angka
- BPS Bangkalan, 2021, Bangkalan Dalam Angka

Penelitian:

- Eni Sri Rahayu Ningsih dan Hery Purwanto, 2019, Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB-Universitas Trunojoyo Madura (Jurnal Belum dipublikasikan)
- Muhammad Ersya Faraby dan Fachrur Rozi, 2021, Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 67-74
- Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/48/Kpts/433.013/2019 tentang Tim Bupati Untuk percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan.

Artikel online:

[Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20191213/45/1181184/ini-tantangan-terbesar-dalam-membangun-kawasan-industri), Ini Tantangan Terbesar dalam Membangun Kawasan Industri", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191213/45/1181184/ini-tantangan-terbesar-dalam-membangun-kawasan-industri>, Author: Aprianus Doni, Editor : Zufrizal

[Kompas.com](https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/09/070200023/populer-sains-penyebab-kasus-covid-19-di-bangkalan-madura-naik-makanan?page=all), Penyebab Kasus Covid-19 di Bangkalan Madura Naik <https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/09/070200023/populer-sains-penyebab-kasus-covid-19-di-bangkalan-madura-naik-makanan?page=all>.

Penulis : Gloria Setyvani Putri Editor : Gloria Setyvani Putri



Laporan Pelaksanaan:

1. MENGAJI PROGRAM KERJA DESA DI KECAMATAN KAMAL

Review dan Analisis Program Pembangunan Desa Menuju Desa Wisata
Kecamatan Kamal
Musrenbangdes 2022

No	Desa	Tema Pembaguan Wisata	jumlah Usulan Kegiatan	Jumlah Pembangunan Nuansa Wisata	Jenis Kegiatan	Alamat	Keterangan
1	Banyu juh	Tidak Ada	27	3	Pelatihan Kerajinan, peningkatan kapasitas UMKM Pembangunan / rehab drainase Pembuatan Odeng 5 klm?	Penyantren jl trunjoyo Sawah Karang	tidak diarahkan ke pengembangan wisata tidak diarahkan ke pengembangan wisata tidak diarahkan ke pengembangan wisata
2	Gili Anyar	Tidak ada	4	Tidak ada			
3	Gili barat	Sudah ada	9	3	Pengadaan obek wisata mangrove Pembangunan / rehab drainase jalan Penerangan jalan	gili barat jalan tanjungan gili barat	perlu didukung kegiatan lain apa ini mendukung gili barat? apa ini mendukung gili barat?
4	Gili Timur	Sudah ada	12	6	Pengadaan obek wisata Peningkatan BUMDES Jalan poros desa hot mix Jalan makadam Jalan makadam	Dusun Sumber Gili timur Dusun Markas Dusun Candih Dusun Markas	apa ini mendukung dusun sumber? apa ini mendukung dusun sumber? apa ini mendukung dusun sumber? apa ini mendukung dusun sumber?

					Jalan makadam	Dusun Sumber	apa ini mendukung dusun sumber?
5	Kamal	Sudah ada	5	3	Pengadaan wisata kuliner pelabuhan timur	pelabuhan timur	jaga kesopanan dan etika saat malam hari
					Pengadaaan PJU	Dusun lembah	Dusun lembah?? Bukan mendukung pelabuhan timur?
					Pembangunan rehab jalan	kampung kejawan	apa ini mendukung pelabuhan timur?
6	Kebun	Tidak ada	5	0			
7	Pendab	Tidak ada	8	0			
8	Tanjungan	Tidak ada	8	0			
9	Tanjungjati	Tidak ada	4	1	Pengembangan kesenian pencak silat	Tanjung jati	harus fokus ke pagelaran keseniannya mjd wista permanen
10	Telang		13	0			
			95	16	17%		

Saran:

1. Perlu sosialisasi lebih gencar misi dan visi bupati menciptakan desa wisata di kabupaten bangkalan (1 desa 1 objek wisata)
2. Perlu komitmen dan kebersamaan masyarakat untuk sadar wisata sebagai penarik peningkatan pendapatan desa dan masyarakat
3. Perlu kontrol dari pihak terkait (Bappeda, OPD dan TPPD) agar pembangunan desa bsa sejalan dengan misi visi bupati
4. Pola pembangunan bersinergi antar dusun, antar desa, antar kecamatan
5. Pola pembangunan terintegrasi antar OPD dalam mendukung desa wisata

2. MENGHADIRI MUSRENBANGCAM KECAMATAN KAMAL

Bidang ini hadir dalam acara musrenbang Kecamatan di Kantor kecamatan kamal, memberikan masukan dan pertanyaan kepada pihak kecamatan dan desatentang arah program kerja:

- (1) Sesuaikan dengan pencapaian visi dan misi bupati
- (2) Kesepakatan TPPD menetapkan Bangkalan sebagai kota wisata
- (3) Kesepakatan TPPD menyarankan pembentukan satu desa satu objek kunjungan wisata



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Soekarno – Hetta No. 35 A Telep. (031) 30632183
e-mail: bappeda@bangkalkab.go.id
BANGKALAN – 69116

Bangkalan, 05 Februari 2021

Nomor : 050/ 142 /433.201/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Jadwal
Musrenbang Kecamatan
Tahun 2021

Kepada : Ketua Tim Percepatan
Pembangunan Daerah
di- TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Jadwal Musrenbang Kecamatan Kabupaten Bangkalan sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan ketua tim TPPD untuk dapatnya menugaskan 1 (satu) orang anggota TPPD guna hadir pada setiap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Tri Susana (082233129923).

Demikian untuk menjadi maklum.

JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	TRAGAH	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM A
2	KWANYAR	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM B
3	AROSBAYA	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM C
4	BURNEH	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM D
5	GEGER	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM A
6	KLAMPIS	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM B
7	SEPULUH	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM C
8	LABANG	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM D
9	TANAH MERAH	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM A
10	KAMAL	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM B
11	GALIS	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM C
12	TANJUNG BUMI	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM D
13	SOCAN	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM E
14	KOKOP	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM A
15	KONANG	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM B
16	BLEGA	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM C
17	MODUNG	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM D
18	BANGKALAN	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM E

3. MENGAJI PROGRAM KERJA DESA DI KECAMATAN KONANG

**Review dan Analisis Program Pembangunan Desa Menuju Desa Wisata
Kecamatan Konang
Musrenbangdes 2022**

No	Desa	Tema Pembangunan Wisata	jumlah Usulan Kegiatan	Jumlah Pembangunan Nuansa Wisata	Jenis Kegiatan	Alamat	Keterangan
1	Bandung	Sudah ada	22	1	Wisata Kuliner agar akses masyarakat bandung lebih mudah jika membutuhkan makanan	Dusun Pangloros, Kab. Bangkalan, Konang, Bandung	Belum menjadi prioritas utama
2	Batokaban	Tidak ada	6	0			
3	Campor	Tidak ada	7	0			
4	Cangkareman	Tidak ada	12	0			
5	Durin barat		69	2	Pelestarian Benda Cagar Budaya Pengembangan Objek Wisata dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Dusun tambak dusun klobur	Belum menjadi prioritas utama
6	Durin Timur	Tidak ada	8	0			
7	Galis Dajah	Tidak ada	7	0			
8	Genteng	Sudah ada	9	1	Di Desa Genteng ada potensi wisata yang besar yaitu Api Alam	Dusun Gubugan	Belum menjadi prioritas utama
9	Kanegarah	Tidak ada	8	0			
10	Konang	Sudah ada	14	1	Pengembangan Objek Wisata dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Konang Timur	Belum menjadi prioritas utama
11	Pakes	Tidak ada	9	0			
12	Sambiyan	Tidak ada	23	0			
13	Sen Asen	Tidak ada	18	0			
			212	5			
			Wisata	2%			

Saran:

1. Perlu sosialisasi lebih gencar misi dan visi bupati menciptakan desa wisata di kabupaten bangkalan (1 desa 1 objek wisata)
2. Perlu komitmen dan kebersamaan masyarakat untuk sadar wisata sebagai penarik peningkatan pendapatan desa dan masyarakat
3. Perlu kontrol dari pihak terkait (Bappeda, OPD dan TPPD) agar pembangunan desa bsa sejalan dengan visi misi bupati
4. Pola pembangunan bersinergi antar dusun, antar desa, antar kecamatan
5. Pola pembangunan terintegrasi antar OPD dalam mendukung desa wisata

4. MENGHADIRI MUSRENBANGCAM KECAMATAN KAMAL

Bidang ini hadir dalam acara musrenbang Kecamatan di Kantor kecamatan kamal, memberikan masukan dan pertanyaan kepada pihak kecamatan dan desatentang arah program kerja:

1. Sesuaikan dengan pencapaian visi dan misi bupati
2. Kesepakatan TPPD menetapkan Bangkalan sebagai kota wisata
3. Kesepakatan TPPD menyarankan pembentukan satu desa satu objek kunjungan wisata.

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Soekarno - Hatta No. 35 A. Telep. (031) 30632183 e-mail: bappeda@bangkalankab.go.id BANGKALAN - 69116			
Bangkalan, 05 Februari 2021			
Kepada :		Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah di- TEMPAT	
Nomor :	050/ 143.201/2021		
Sifat :	Penting		
Lampiran :	1 (satu) Lembar		
Perihal :	Penyampaian Jadwal Musrenbang Kecamatan Tahun 2021		
Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Jadwal Musrenbang Kecamatan Kabupaten Bangkalan sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan ketua tim TPPD untuk dapatnya menugaskan 1 (satu) orang anggota TPPD guna hadir pada setiap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Tri Susana (082233129923). Demikian untuk menjadi maklum.			
JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021			
NO	KECAMATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	TRAGAH	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM A
2	KWANYAR	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM B
3	AROSBAYA	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM C
4	BURNEH	Senin, 08 FEBRUARI 2021	TIM D
5	GEGER	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM A
6	KLAMPIS	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM B
7	SEPULUH	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM C
8	LABANG	Selasa, 09 FEBRUARI 2021	TIM D
9	TANAH MERAH	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM A
10	KAMAL	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM B
11	GALIS	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM C
12	TANJUNG BUMI	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM D
13	SOCAB	Rabu, 10 FEBRUARI 2021	TIM E
14	KOKOP	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM A
15	KONANG	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM B
16	BLEGA	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM C
17	MODUNG	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM D
18	BANGKALAN	Kamis, 11 FEBRUARI 2021	TIM E

5. MEMBUAT JAWABAN ATAS PERTANYAAN DPRD BANGKALAN TENTANG KEBERADAAN TPPD

Tim membantu menjawab pertanyaan yang khusus tentang keberadaan TPPD dan tugasnya. Khususnya untuk pertanyaan no 5 sampai dengan no 8

Jawaban sebagai Masukan dari bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Pertanyaan tentang: Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD)

1. Bagaimana keterlibatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah pada proses penyusunan dokumen P-RPJMD? Mohon disiapkan bukti pendukungnya
2. Bagaimana kesesuaian program kerja tim percepatan Pembangunan Daerah dengan P-RPJMD? Mohon disiapkan bukti pendukungnya
3. Dalam dokumen P-RPJMD, Program kerja tim percepatan Pembangunan Daerah masuk di OPD mana saja? Mohon disiapkan bukti pendukungnya
4. Apa saja masukan untuk penyempurnaan dokumen P-RPJMD?

Jawaban:

1. Keterlibatan Tim percepatan pembangunan daerah (TPPD) dalam penyusunan dokumen P-RPJMD:

TPPD senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak Sekda, Bappeda, dan dinas lainnya yang terkait melakukan penelaahan atas RPJMD yang ada dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, TPPD juga bekerja menilai dan menerima masukan masyarakat tentang konsep dan arah pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa bentuk masukan TPPD kepada pemerintah daerah:

- a. Menyampaikan masukan tentang kendala atau masalah yang terjadi di masyarakat berdasarkan masukan dan laporan masyarakat, serta pengamatan di lapangan, dan sebenarnya harusnya menjadi program prioritas namun belum masuk sebagai bagian dari RPJMD Pemerintah daerah.
- b. Memberi masukan tentang arah prioritas pembangunan dan program kerja atau kegiatan yang baru dan lebih strategis serta dapat meningkatkan percepatan peningkatan PAD kabupaten Bangkalan, misalnya prioritas pembangunan di sektor pariwisata, sektor pengembangan digitalisasi desa dan lain sebagainya

2. Kesesuaian program kerja tim percepatan Pembangunan Daerah dengan P-RPJMD?

TPPD senantiasa berupaya maksimal untuk mensupport arah dan prioritas pembangunan yang ada di RPJMD dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang cepat dan strategis mengantisipasi perubahan atau dinamika yang ada di lingkungan, nasional dan bahkan dunia. Misalkan perkembangan dunia bisnis yang menggunakan media online sebagai alat mempromosikan produk maka itu yang kita dorong kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak mengembangkan kegiatan itu kepada para UMKM agar lebih tumbuh mengatasi pandemic covid 19 ini.

Disamping itu kami juga bersinergi dengan kampus UTM yang beberapa tahun terakhir telah membuat terobosan berupa pengabdian masyarakat dan penelitian diarahkan kepada stakeholder atau masyarakat termasuk di dalamnya adalah desa-desa dan masyarakat di Bangkalan. Banyak sekali desa-desa dan masyarakat yang tertarik dengan program ini terutama kegiatan KKN Tematik yang berharap desa bias mempercepat pembukaan desa wisata, percepatan pembukaan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama membangun BUMDes tersebut.

Disamping itu, kami juga berinisiatif dalam mendorong peningkatan PAD di desa-desa dengan cara mendorong pembukaan dan pengaktifan BUMDes dengan cara mendorong dinas melakukan kegiatan pelatihan manajemen BUMDes dan pelatihan pengelolaan usaha BUMDes.

3. Dalam dokumen P-RPJMD, Program kerja tim percepatan Pembangunan Daerah masuk di OPD mana saja

Kegiatan TPPD diarahkan agar :

- Terjadi sinergi kegiatan atau program kerja antar dinas atau OPD yang ada di seluruh kabupaten.
- Terciptanya sinergi kegiatan atau program kerja antar desa sehingga mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa.
- Berusaha menghilangkan sekat-sekat atau egoisme pembangunan tanpa ada sinergi antar bidang, antar dinas, antar OPD dan antar desa.
- Oleh karena itu kami mendorong terciptanya sinergi di seluruh OPD dengan cara:
 - a. Mengumpulkan OPD-OPD, bertemu dengan pemerintah kecamatan dan desa-desa serta kemudian meminta penjelasan tentang program kerjanya, dan menilai kesesuaian

dengan visi, misi dan juga dokumen RPJMD pemerintah daerah.

- b. Jika tidak ada kesesuaian dengan hal tersebut di atas maka kami TPPD memberikan arahan dan saran agar diperbaiki dan diarahkan ke pencapaian visi, misi dan juga dokumen RPJMD pemerintah daerah.
- c. Mendorong agar setiap desa untuk memunculkan satu tujuan wisata sebagaimana sesuai dengan salah satu prioritas PRPJMD. Berdasarkan hasil diskusi diberbagai kesempatan misalkan musrenbang, peninjauan langsung dan diskusi melalui telepon, maka terlihat bahwa masyarakat desa sangat antusias untuk menyambut program satu desa satu tujuan wisata.
- d. Selanjutnya mereka berharap agar pemerintah kabupaten untuk segera mensupport mereka dengan perbaikan sarana jalan raya menuju ke lokasi tujuan wisata.
- e. Jika pembangunan atau perbaikan jalan menuju lokasi wisata desa terlaksana maka pemerintah desa bersedia untuk membangun lokasi wisata mereka berdasarkan kekuatan dana yang ada misalkan dari PAD atau ADD.

4. Apa saja masukan untuk penyempurnaan dokumen P-RPJMD?

Masukan penyempurnaan dokumen P-RPJMD, meliputi beberapa hal;

Rancangan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bangkalan

No	7 Agenda Pembangunan RPJMN	Rancangan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kab Bangkalan	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 Kab Bangkalan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemantapan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pariwisata Dan Agribisnis Di Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Sektor Jasa.	Peningkatan pembangunan melalui kemandirian ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata (2022)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Daya Saing Wilayah Yang Mudah Diakses (Inklusif) Dengan Memperhatikan Tata Ruang, Harmonisasi Social Dan Keadilan	Pembangunan yang difokuskan pada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan rasa aman melalui implementasi nilai-nilai kehidupan keagamaan (2019)

No	7 Agenda Pembangunan RPJMN	Rancangan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kab Bangkalan	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 Kab Bangkalan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Perluasan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Unggul	Percepatan Pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM untuk Menciptakan Pertumbuhan yang Berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik dasar yang berkualitas dan merata (2020)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Yang Berkualitas Dan Merata	Pembangunan pemantapan kemandirian ekonomi berbasis agribisnis dan didukung sektor industri, perdagangan dan sektor jasa (2023)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang efektif di dorong oleh penguatan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Reformasi birokrasi (2021)

Selain hal tersebut di atas ada beberapa masukan yang lebih bersifat strategis dari para anggota TPPD:

1. Arah prioritas pembangunan dengan mengembangkan pembangunan wisata yang meliputi wisata alam, wisata religi, wisata makanan dan wisata budaya Madura.
2. Pengembangan wisata dari desa, kecamatan dan dinas-dinas
3. Perubahan dan penyesuaian RTRW bisa digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam Perubahan RPJMD.
4. Salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemic covid 19, diantaranya mendongkrak sektor pangan yang bisa diintegrasikan dengan sektor pertanian dalam arti luas.
5. Kebijakan pembangunan di kabupaten Bangkalan lebih baik selalu fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena sampai saat ini pertumbuhan perekonomian Kabupaten bangkalan belum mencapai angka yang signifikan.
6. Memunculkan ada ikon-ikon pembangunan yang mengintegrasikan program dan kegiatan perangkat daerah terkait.
7. Re-birokrasi pengalihan eselon III dan eselon IV bisa dijadikan juga isu strategis.
8. Pemkab harus mempunyai command centre yang dikelola secara mandiri. Pemkab juga bisa berkoordinasi dengan PHRI untuk membahas pengembangan pariwisata.

6. MENGHADIRI ACARA DENGAR PENDAPAT TENTANG “TPPD MAKAN GAJI BUTA” VIA ZOOM

Sekretaris bidang ekonomi dan kesejahteraan hadir dengar pendapatan via Zoom

7. MENILAI KAJIAN AKADEMIK INDIKATOR KESALEHAN SOSIAL BAPPEDA DAN KEMENAG

Assalamu'alaikumW Wb

Mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir secara offline, karena bersamaan dengan acara di kampus:

Berikut ini kami sampaikan hasil review saya atas laporan penyusunan dokumen indeks kesalehan sosial masyarakat Bangkalan 2021. Semoga bisa menjadi masukan agar laporan ini bisa lebih baik dan secara ilmiah dapat dpertanggungjawabkan.

Catatan dan masukan:

1. Daftar pustaka sebaiknya harus benar-benar dipakai dalam kutipan.
Ada 6 sumber bacaan didaftar pustaka (Dalu, Mahfudz, Gerungan, Rahardjo, Rahman, danWalgito) hanya ditulis tapi kutikan di semua bab tidakada. Ini tidak memenuhi kaidah penulisan ilmiah.
Sehingga kita akan tahu mengutip darimana saja tulisan-tulisan yang ada dikajian ini. Kalau tidak ada kutipan tapi ada di daftar pustaka seakan asal ada saja di daftar pustaka. Selain itu seakan-akan semua hasil tulisan sendiri tidak menggunakan referensi. Padahal hasil tes plagiat ternyata banyak “mengcopy paste” dariberbagaisumber.
2. Referensi di daftar pustaka sudah teramat lampau (tahun 1982, 1983, 1985, 1996, 1997) dan bisa saja sudah tidak sesuai. Sebaiknya menggunakan referensi yang terbaru misalkan 5 tahun terakhir (paling lama 2016).
3. Misalkan hasil penelitian kementerian agama RI tentang indeks kesalehan sosial harus dikutip dan jadi referensi utama. Referensi ini belum dibaca dan belum dikutip dan dijadikan referensi utama: (Raudatul Ulum, 2019;
Sumber:
https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1611128195Indeks_Kesalehan_Sosial_2019.pdf
4. Semua tulisan dan data yang ditulis dan diperoleh dari sumber harus disampaikan sumber referensinya (diakui kalau itu

mengutip), agar jika ada pihak yang mempertanyakan dan bahkan menggugat karya ilmiahnya digunakan tanpa ijin atau tanpa SOP yang benar dapat terjawab secara benar.

5. Sehubungan sudah ada hasil penelitian yang dilakukan kementerian agama RI, yang sama dengan yang saya, karena tujuan utamanya menilai pelaksanaan pengukuran indeks kesalehan sosial maka harusnya tidak perlu penelitian yang rumit seperti ini. Cukup menggunakan ukuran dari hasil riset sebelumnya (2019). Karena ukuran kesalehan sosial sudah ada dan sudah digunakan oleh kementerian agama (Raudatul Ulum, 2019; Sumber:

https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets/front/pdf/1611128195Indeks_Kesalehan_Sosial_2019.pdf

Dari indikator kesalehan sosial yang ditetapkan kemenag RI tahun 2020 langsung saja diterapkan dalam masyarakat Bangkalan dan diukur sejauh mana pencapaiannya. Kita tidak lagi banyak menggunakan alat lain, dan membangun indikator baru. Lebih efisien dan efektif.

6. Tidak perlu menentukan dan mengukur lagi definisi variabel penelitian, dalam hasil penelitian departemen agama RI sudah ada dan langsung bisa dipakai atau kita lakukan REPLIKASI. Tidak perlu mendefinisikan lagi.
7. Konsistensi penggunaan variabel harus jelas dan clear. Di rumusan masalah menggunakan variabel namanya **"pengetahuan masyarakat beragama di Bangkalan tentang ibadah sosial"**, tapi di lain halaman namanya menjadi **"pengetahuan"** dan juga **"pengetahuan tentang kesalehan sosial"**. Ini yang benar yang mana? Ini menjadi bias dan tidak jelas ukurannya, karena variabel berubah nama.
8. Dalam kaidah penelitian (kajian), antara judul, rumusan masalah, tujuan, pembahasan dan kesimpulan harus sama (baik jumlahnya maupun isinya). Jika rumusan ada 4 maka tujuan, pembahasan dan kesimpulan juga sama. Tidak boleh berbeda jumlah dan isinya. Misalkan rumusan ada 4, ternyata malah hipotesisnya ada 1 ini tidak nyambung. Apalagi dipembahasan tidak sama jumlah dan isinya dengan rumusan masalah.
9. Penggunaan sampelnya di rumah ibadah seluruh agama untuk tujuan generalisasi harusnya proposional. Tidak terlalu jauh berbeda. karena kalau jauh perbedaannya dan disimpulkan secara umum untuk seluruh agama menjadi bias hasilnya.

Perlu diambil sampel yang proporsional untuk semua agama agar bisa disimpulkan secara generalisasi.

	Islam	Katolik	Kristen	Budha	Hindu	Konghuchu
2019	267	3				
2020	372	3	3			
2021	369		9			

10. Cek dan mohon dicari sumber bacaan dari mana Variabel Kesalihan Sosial (Y): ini? Ini penting agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan keilmiah.

- (a) solidaritas sosial,
- (b) kerjasama/mutualitas,
- (c) toleransi,
- (d) adil, dan
- (e) menjaga ketertiban umum.

11. Cek dan mohon dicari sumbernya: Variabel Pengetahuan atau pengetahuan kesalihan sosial (X) - Tidak konsisten -- dari mana sumbernya. (X): ini? Ini penting agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan keilmiah.

Pengetahuan seseorang/responden atas pengertian kesalehan sosial yang meliputi:

- (a) solidaritas sosial (*al- takaful al-ijtima'i*),
- (b) toleransi (*al-tasamuh*),
- (c) mutualitas/kerjasama (*al-ta'awun*),
- (d) tengah-tengah (*al-I'tidal*)
- (e) stabilitas (*al-tsabat*).

12. Indikator dari variabel Y dan X di atas ternyata sama (Lihat poin 11 dan 12 sebagaimana dalam laporan), mana mungkin indikatornya sama? Dan MANA BISA dihubungkan kalau sama. Ini sama saja dengan **jeruk makan jeruk**. Kalau diuji asumsi klasiknya pasti tidak terpenuhi karena ada kesamaan (**terjadi multikolinearitas data**). Tapi ternyata dipaksakan dilakukan – diragukan hasil pengujiannya karena tidak memenuhikaidah **asumsi klasik** pengujian data.

“Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui terjadinya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka

terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (non multikolinearitas)"

13. **Kisi-Kisi dan Model skala dalam Instrumen Kesalehan Sosial - darimana sumbernya?** Ini penting agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan keilmiah.

14. **Bagian pembahasan: tidak menjawab secara terstruktur rumusan atau pertanyaan penelitian (ada 4 pertanyaan,harusnya mengacu pada 4 ini pembahasannya)**

Hasil Pembahasan:

1. Pertanyaan pertama rumusan masalah **tidak terjawab**
 2. Pertanyaan kedua "Bagaimana pemetaan kesalehan sosial (implementasi ibadah sosial) yang terjadi di Kabupaten Bangkalan? ---- **tidak terjawab**
 3. Perertanyaan ketiga "pola kausalitas antara pengetahuan dengan kesalehan sosial pada masyarakat beragama di Bangkalan,mana?
 4. Berapa indeks kesalehan sosial masyarakat Bangkalan saat ini? --- mana dalam pembahasan?, dengan cara apa dan metode bagaimana menentukannya? Dasar teorinya mana?
15. Apa urgensi menggunakan 'uji statistik *Structural Equation Modeling (SEM)* secara inferensial,padahal kalau lihat dari hipotesisnya bisa saja cukup dengan uji regresi sederhana SPSS bisa)

Kalau menggunakan SEM:

Perlu disampaikan alasan dan syarat dipenuhiya menggunakan alat ini.

Perlu dilengkapi gambar model SEM nya sehingga menjadi alasan ilmiah

penggunaanya

Model analisis SEM. Perlu tunjukkan sebelum diuji.

Hasil uji SEM nya perlu disertakan

16. Kesimpulan tidak konsisten, Tidak menjawab 4 permasalahan penelitian.

Disimpulan ada hasil SEM padahal dipembahasan tidak ada model, dan hasil olah data dengan SEM

8. MELAKSANAKAN EVALUASI PENCAPAIAN KIENERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH OPD

Laporan Evaluasi Pencapaian PAD Tahun 2021

Hasil analisis data PAD:

1. Pencapaian PAD per okt baru 81.5%
2. Porsi PAD/Penerimaan Daerah turun menjadi 9% dibanding tahun 2020 sebesar 11%
3. Target 2021 turun dari 211 Milyar menjadi Rp 202 Milyar
4. Realisasi pada THN lalu 233M, per okt baru 190 M Sampai dengan bulan Nopember 2021 pencapaian PAD sudah mencapai 80%

Berikut ringkasan hasil evaluasi penyebab atau permasalahan belum optimalnya penerimaan PAD:

No	Dinas	Objek	Masalah	Tindak Lanjut
1	Bapenda	Pajak sarang burung wallet:	Kemungkinan tidak akan tercapai karena sulit bertemu dengan wajib pajak	Perlu dipanggiil atau ada pertemuan dengan wajib pajak
		Parkir pasar	Tidak memiliki lahan parkir Tidak ada portal Tidak dikelola oleh pemerintah daerah Tiak ada Mou dengan pemerintah daerah	Perlu dibuatkan lahan parkir bagi pasar yang belum ada Perlu dibuatkan portal Perlu ada pengelolaan parkir dari pemerintah daerah Perlu ada segera Mou dengan pemerintah daerah
		Pajak bumi dan bangunan	Kemungkinan tidak akan tercapai karena Penerimaan PBB dari desa terkendala janji politik kepala desa yang membebaskan pembayaran PBB (PBB di tanggung kepala desa)	Perlu minta ketegasan pembayaran dari kepala desa dan atau wajib pajak PBB
			Pendapatan dari IMB terancam hilang kira-kira 1 Milyar rupiah. Karena di UU cipta karya IMB dihapus.	Segera dibuat dan mendesak dibuatkan untuk regulasi PBG untuk mendapatkan PAD dari IMB yang akan terhapus
			Retribusi dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) sampai saat ini belum dibuat dan mendesak dibuatkan untuk mendapatkan PAD	Segera dibuat dan mendesak dibuatkan untuk regulasi PBG untuk mendapatkan PAD dari IMB yang akan terhapus
2	Dinas Perhubungan	Parkir berlangganan	1.Parkir Berlangganan yang realisasinya tidak sesuai dengan rencana	Perlu optimalisasi dan pengawasan parkir berlangganan di setiap tempat
		Parkir berlangganan	2.Sebagian lokasi parkir tepi jalan umum mulai menerapkan parker berlangganan	Perlu optimalisasi dan pengawasan parkir berlangganan di setiap tempat
3	Dinas Perhubungan	Uji Kendaraan	1.Kurangnya disiplin konsumen terhadap kesadaran untuk uji kendaraan bermotor (per/6 bln) terutama di daerah pelosok	Perlu ada sosialisasi dan sanksi tegas agar pemilik kendaraan segera melakukan uji kendaraan (misal dengan mengirim surat atau menelepon)
		Perubahan Tinggi Truk	2.Kendaraan Truck yang tingginya 1,5 (sesuai Standart pabrik) meter di tambah menjadi 1, 7 meter	Perlu aturan main yang benar dan dapat dipatuhi semuanya

No	Dinas	Objek	Masalah	Tindak Lanjut
		Trayek MPU	Mpu mulai tidak beroperasi Karena mulai banyaknya kendaraan pribadi dan ojek online	Perlu mengatur kendaraan pribadi dan online yang dijadikan kendaraan umum (taxi)
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PAD Objek wisata	Belum banyak setoran PAD dari objek wisata	Ada payung hukum untuk menagih di obejk wisata
		Mou pengelolaan wisata	Banyak objek wisata yang belum ada MOU dengan Pemda	Perlu Mou dengan pihak sekitar objek wisata
		Pengelolaan objek wisata	Pengelolaan secara mandiri dan tradisonal tidak banyak dilengkapi sarana parasarana umum	Dikelola secara profsional dan penyediaan sarana umum dari Pemda
5	Dinas Peternakan	Potensi potong hewan	Potensi 5 besar di Jawa Timur, namun setoran PAD untuk rumah potong tidak maksimal	Perlu secara serius memotret potensi ini dan memanfaatkannya
		Perubahan data	Pemetaan data potensi peternakan perlu diperbaharui karena datanya sudah lama dan belum up to date	Perlu upaya perbaharuan data secara menyeluruh database Bangkalan
		Kualitas RPH	Rumah potong hewan yang berkualitas hanya 1 yang siap (Tanjung bumi), padahal potensinya cukup besar bisa mencapai 60 juta setahun	Perlu peningkatan jumlah dan kualitas rumah potong hewan (RPH)
6	Dinas Perdagangan	Kios	Sejak adanya Suramadu banyak pedagang kios yang pindah jualan ke Suramadu karena kondisi penumpang kapal yang sangat berkurang	Kios di Suramadu perlu dikelola dan diberi retribusi Membuat kios-kios baru di tempat strategis liannya
7	Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan Chemo Therapy	Belum ada sarana pelayanan (Chemo therapy) sehingga banyak pasien ke RS surabaya	Perlu peningkatan fasilitas chemo therapy di RSUD Bangkalan
		Ijin BPJS	BPJS belum dapat memfasilitasi perawatan chemo therapy	Perlu dukungan Bupati agar BPJS bisa memberi ijin untuk pelayanan chemo therapy
8	Dinas PU dan Penataan Ruang		Retribusi Penyewaan tanah (bantaran sungai) tidak dibayar karena kurangnya sosialisasi dan punishment terhadap penyewa tanah	Perlu sosialisasi dan punishment terhadap penyewa tanah
			Retribusi Pemakaian Alat (sewa wales) menurun, karena ➢ Umur alat semakin tua ➢ Jenis alat yang ada kurang bervariasi ➢ Banyak Penyedia Jasa yang memiliki alat sendiri Tidak diperlukan pada jenis pekerjaan yang ada	Perlu biaya pemeliharaan yang mencukupi Perlu pengadaan alat sewa wales yang baru dan jumlahnya ditambahi karena kebutuhan lapangan yang banyak

9. INISIASI PEMBENTUKAN BUMDES PERCONTOHAN BANGKALAN

Sekolah Bumdes Kabupaten Bangkalan Dimulai , Ra Latif Perintahkan 5 Praktisi Sebagai Pengarah Sekolah Bumdes

<https://hosnews.id/sekolah-bumdes-kabupaten-bangkalan-dimulai-ra-latif-perintahkan-5-praktisi-sebagai-pengarah-sekolah-bumdes/>



HOSNEWS.ID- Bangkalan, Kamis 16 September 2021 pembelajaran di sekolah Bumdes Kabupaten Bangkalan resmi dimulai, nama sekolah ini kedengarannya asing ditelinga kita tapi ternyata terlaksana dan mulai dilaksanakan jadwal bimbingan serta pembelajaran kepada beberapa desa . Sekolah Bumdes ini sifatnya adalah pendampingan kepada Bumdes se Kabupaten Bangkalan yang dilakukan secara bertahap , agar Bumdes Bumdes diKabupaten Bangkalan bisa maksimal menjadi wadah aktifitas ekonomi desa yang berbadan hukum dan dapat meningkatkan pendapatan desa masing masing.

Demikian yang disampaikan oleh Dr. Bambang Haryadi.,MSi.,AK., CFrA pengarah bidang Managemen pemerintahan,kajian kelayakan dan tata kelola anggaran di Sekolah Bumdes Kabupaten Bangkalan.

"sementara pengarah sekolah Bumdes lainnya juga menyampaikan bahwa desa desa di Kabupaten Bangkalan akan dibantu secara gratis Bumdes Bundes nya melalui bantuan bimbingan dan pembelajaran di sekolah Bumdes Kabupaten Bangkalan khususnya tentang pengembangan potensi

sumber alam desa agar kemudian bisa dikelola menjadi sumber alam yang menghasilkan sesuatu keuntungan bagi desa khususnya agar bisa menambah lapangan kerja didesa masing masing ” .

Hal itu disampaikan oleh pengarah Dr. Akhmad Farid.,SPi.,MT bidang Teknologi Pertanian , perkebunan , peternakan dan kelautan dan budidaya perikanan Berikut ini nama nama Pengarah Sekolah BumDes Kabupaten Bangkalan.

Mohamad Iksan.(Bidang organisasi ,kelayakan usaha dan ekonomi kerakyatan)Dr.Bambang Haryadi.,MSi.,AK., CFrA(Managemen pemerintahan , kajian kelayakan dan tata kelola anggaran) M. Latif S.Kom., M.T(Informatika teknologi ,digital marketing dan teknologi tepat guna) Dr. Akhmad Farid.,SPi.,MT(Teknologi Pertanian , perkebunan , peternakan dan kelautan dan perikanan) Muhammad Sahri.,SH.,MH(Regulasi ,hukum dan perundang undangan)Sementara itu Mohamad Iksan yang didaulat menjadi pengarah bidang organisasi ,

kelayakan usaha dan ekonomi kerakyatan ketika diklarifikasi media hanya menyampaikan ,bahwa ‘terbentuknya wadah yang kemudian diberi nama Sekolah Bumdes Kabupaten Bangkalan itu adalah wujud dari beberapa pemikiran tentang pengembangan ekonomi kerakyatan yang diinginkan oleh Ra Latif sebagai Bupati Bangkalan , dan pilihan kebijakan beliau salah satunya dimulai dari sekolah Bumdes Kabupaten Bangkalan ini’.

Mohamad Iksan menjelaskan bahwa para pengarah sekolah Bumdes adalah anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bangkalan dan praktisi hukum .’ Doa dan dukungannya ya semoga kita bisa maksimal dan bermanfaat kepada desa juga kepada masyarakat ? ’ pungkas nya.

Pengarah Sekolah BumDes Kabupaten Bangkalan.

Mohamad Iksan.

(Bidang organisasi, kelayakan usaha dan ekonomi kerakyatan)

Dr.Bambang Haryadi.,MSi.,AK., CFrA

(Managemen pemerintahan, kajian kelayakan dan tata kelola
anggaran)

M. Latif S.Kom., M.T

(Informatika teknologi , marketing digital dan alih teknologi)

Dr. Akhmad Farid.,SPi.,MT

(Teknologi Pertanian , perkebunan , peternakan dan kelautan dan
perikanan)

Muhammad Sahri.,SH.,MH

(Regulasi , hukum dan perundang undangan)

10.MELAKSANAKAN SEKOLAH BUMDES BANGKALAN



11.MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS KE PASURUAN

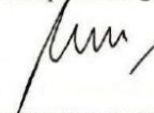
LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I DASAR : 1. Surat Bupati Bangkalan Tanggal 27 September 2021, nomor: 421.3/2860/433.101/2021
2. Surat Perintah Tugas Wakil Bupati Bangkalan Nomor: 094 /235/433.201/2021 Tanggal 30 September 2021
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Melakukan study banding pelaksanaan pemberian insentif guru madrasah diniyah dan guru ngaji
- III WAKTU PELAKSANAAN : Hari Jumat, Tanggal 01 Oktober 2021
- IV NAMA PETUGAS : 1. Machmud Fauzi, SH
2. Drs. Moch. Kamil, M.Pd
- V DAERAH/TUJUAN/
INSTANSI YANG
DIKUNJUNGI : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci No. Km 9 Area sawah/kebun, Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan
- VI HADIR DALAM PERTEMUAN : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Pasuruan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Pasuruan
3. Kabid Kasubbid Dinas Pendidikan Kab Pasuruan
4. BPJS Kabupaten Pasuruan
5. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kab Bangkalan
6. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
7. Kabag Hukum Setda Kab Bangkalan
8. Kabid Kasubbid Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
9. Kepala Bidang PPM Bappeda Kab Bangkalan
10. Kabid Anggaran BPKAD Kab Bangkalan
11. Kasubbid Data dan Pelaporan Bappeda Kab Bangkalan
12. Perwakilan BPJS Kabupaten Bangkalan
13. Perwakilan Bank Jatim Kabupaten Bangkalan
- VII PETUNJUK/ARAHAN YANG DIBERIKAN : 1. Dalam hal pemberian insentif kepada guru madrasah diniyah dan guru ngaji , Kabupaten Pasuruan sudah membentuk Peraturan Kepala Daerah sebagai regulasinya;
2. Hal tersebut untuk mendukung salah satu program prioritas Kabupaten Pasuruan yaitu “ Wak Moqidin” yaitu Wayahe Kumpul Bangun TPQ dan Madrasah Diniyah.
3. Dalam Perkada tersebut mengatur kriteria guru madin dan guru ngaji yang berhak memperoleh insentif serta mengatur juga wajib Madin bagi anak –anak usia tertentu.
4. Dari insentif yang diterima oleh Guru Madin dan Guru Ngaji yang diberikan, terdapat keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan keselamatan kerja mereka.

5. Proses keikutsertaan BPJS Guru Madin dan Guru Ngaji Kabupaten Pasuruan diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPJS, Bank Jatim dan Dinas Pendidikan Kab Pasuruan tentang manfaat keikutsertaan BPJS.
6. Dari sosialisasi tersebut jika ada personal yang berminat untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan akan membuat surat pernyataan untuk dilakukan pemotongan sejumlah dana dari insentif yang mereka terima untuk dibayarkan ke BPJS

Bangkalan, 4 Oktober 2021

Anggota TPPD
Kabupaten Bangkalan



MACHMUD FAUZI, SH

12. PERJALANAN DINAS KE KEMENSOS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/134/433.201/2021 Tanggal 16 April 2021
- II Maksud Dan Tujuan : Menghadiri Rapat Konsultasi ke BKPM RI di Jakarta
- III Waktu Pelaksanaan : Hari Senin dan Selasa tanggal 19-20 April 2021
- IV Nama Petugas : Norhadi
- V Daerah/Tujuan/
Instansi Yang
Dikunjungi : 1. BKPM Jl. Jend. Subroto No. 44, Jakarta
2. Kementerian Sosial Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
- VI Hadir Dalam : 1. Pertemuan dengan BKPM
Pertemuan
 - Kepala BKPM dan tatanannya
 - Bupati Bangkalan
 - Setda Bangkalan
 - Kepala Bappeda Bangkalan
 - Kepala DPMPTSP
 - Kabag Protokol dan Kabag Umum
 - HIPMI Bangkalan2. Pertemuan dengan Kementerian Sosial
 - Menteri Sosial
 - Bupati Bangkalan
 - Setda
 - Kepala Dinas Sosial
 - Bappeda
 - DPMPTSP
 - Protokol dan Umum
- VII Petunjuk/Arahan
Yang Diberikan : 1. Kepala BKPM menyampaikan bahwa dalam meningkatkan investasi harus sesuai dan komitmen terutama kesiapan lahan dan BKPM akan membantu dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan mempersiapkan dan pendukung termasuk data perencanaan pelabuhan, terkait hak milik lahan perhutani pihak BKPM akan memfasilitasi penanganannya dengan Kementerian Kehutanan dalam waktu dekat.
3. Terkait temu bisnis yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, BKPM akan mendukung dan memfasilitasi kesiapan tersebut.
4. Terkait penyerahan dokumen untuk Syaikhona Kholil sebagai pahlawan, Ibu Menteri Sosial menyampaikan lengkap datanya dan akan dibahas kemudian dan untuk Pemkab untuk menyiapkan data ketika ada diskusi lanjutan dengan mempersiapkan data pendukung.

Pelapor

NORHADI

13. TEMU BISNIS

SOLUSI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BANGKALAN

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

KANTOR BUPATI BANGKALAN, AULA DIPONEGORO. 13 OKTOBER 2021

SOLUSI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BANGKALAN

SKALA

A. MIKRO + KECIL (tahan terhadap pandemi)

1. Peningkatan kualitas produksi industri rumahan yaitu kuliner, kerajinan batik dll melalui pelatihan dan penyuluhan
2. Distribusi produk yang memanfaatkan teknologi (melalui gojek, grab, shoopee, tokopedia, blibli dll) , sehingga kondisi pandemi covid 19 tidak menjadi kendala
3. Pemasaran melalui *event* tertentu seperti perpaduan antara festival kuliner dengan destinasi alam yang terbuka. Hal ini dapat membuka akses terhadap pasar regional yang lebih besar (seperti surabaya). Pemasaran dilakukan berbasis media informasi digital (melalui televisi, media sosial dll)

SOLUSI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BANGKALAN

SKALA

B. MENENGAH (memiliki pasar yang lebih besar dan cukup baik menghadapi kondisi pandemi)

1. Memanfaatkan program reforma agraria (BPN) untuk meningkatkan produktifitas komoditas unggul (sapi, kambing, bebek, jagung madura, kedelai) contoh: menyediakan lahan sumber pakan ternak
2. Membangun lembaga pengelola yang dapat membantu memasarkan dan memberi nilai tambah. Pemda sebaiknya dapat menangkap peluang DAK dalam pengadaan alat-alat dari kementan
3. Bantuan prasarana dasar untuk komoditas unggulan asli Bangkalan.

SKALA

C. BESAR

1. Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri eksisting (Tanjung Bulu Pandan, Socah dan Labang) dengan cara :
 - Mendorong BUMD untuk bekerja sama dengan BUMN dan Swasta dengan cara menunjuk konsultan yang bereputasi baik untuk melakukan kajian awal investasi. Konsultan yang bereputasi baik dapat membawa investor
 - Contoh 1: Kawasan Industri Subang, kerja sama yang dilakukan antara BUMN karya dan Kajima dibantu konsultan AECOM
 - Contoh 2: Kawasan Industri JIPE Gresik, kerja sama antara BUMD Jatim+Pelindo+maspion
 - Contoh 3: kawasan industri TUAS (Pelabuhan di Singapore) yang mendapatkan investor melalui konsultan belanda bekerja sama dengan TU Delft

SKALA

C. BESAR

2. Peluang dan industri ^{garam Natrium/airan Karbonat} soda Ash oleh BKPM + PT GARAM+ SUCOFINDO sebaiknya ditangkap
3. Rencana proyek strategis utamanya bersumber APBN dapat menjadi pertimbangan kembali lokasi Kawasan Industri. Contoh: rencana Jalan Lintas Selatan, Waduk Blega+SPAM membuat daerah Labang, Kwanyar, Modung, Blega bernilai strategis untuk ditawarkan sebagai Kawasan industri kepada investor (RTRW Revisi dapat dikondisikan)
4. Pengembangan Kawasan Industri di Bangkalan harus dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen RPJMD Bangkalan. Sebagaimana juga telah disebutkan bahwa Kawasan Industri Bangkalan termasuk dalam 27 Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus RPJMN 2020-2024. Hal ini juga tertuang dalam perpres 80 tahun 2019 yang menjadikan Bangkalan sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

BANGKALAN, 13 OKTOBER 2021
TIM PERCEPATAN KABUPATEN BANGKALAN

WAKIL KETUA

DRS. SETUABUDHI, MM

14. RAPAT PROGRAM PEMBANGUNAN

NOTULA RAPAT TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pelaksanaan :

- Tempat : Ruang Meeting Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan
- Hari : Jum'at
- Tanggal : 28 Mei 2021
- Waktu : 13.00 WIB - selesai
- Acara rapat : Rapat Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

2. Pimpinan Sidang /Rapat :

- Pimpinan Rapat : a. Wakil Bupati Bangkalan
b. Penanggungjawab TPPD
- Moderator : Wakil Ketua TPPD
- Notulen : Kabid Rendalev

3. Susunan Acara :

- Pembukaan
- Materi rapat / Pembahasan
- Diskusi
- Penutup dan Doa

4. Peserta Sidang / Rapat yang hadir :

1. Pengarah TPPD
2. Penanggungjawab TPPD
3. Ketua TPPD
4. Wakil Ketua TPPD
5. Seluruh Sekretaris Bidang TPPD
6. Seluruh Anggota TPPD
7. Kepala Bappeda
8. Kepala BPKAD
9. Kepala Bapenda
10. Kepala Dinas PU & PR
11. Kepala Dinas Kominfo
12. Kabag Organisasi
13. Perwakilan Inspektorat
14. Perwakilan BKPSDA
15. Perwakilan Bagian Hukum
16. Perwakilan Bagian Umum
17. Anggota TAPD

5. Kegiatan Sidang / Rapat :

a. Pembukaan

Rapat dimulai pukul 13.00 WIB dengan dibuka oleh Wakil Bupati Bangkalan Bapak Drs. Mohni, MM selaku Pengarah TPPD Kabupaten Bangkalan.

Bidang TPPD diharapkan untuk dapat merumuskan kebijakan terhadap Belanja Pegawai yang dinilai tinggi oleh Pemerintah Pusat. Karena Kabupaten Bangkalan

menjadi salah satu Kabupaten dengan Belanja Pegawai paling banyak, sehingga perlu dilakukan suatu kebijakan agar kondisi ini dapat teratasi.

b. Pembahasan

Terhadap efisiensi Belanja Pegawai yang dinilai terlalu tinggi, TPPD memberikan masukan antara lain:

- Bapak Setijabudhi :

Kebijakan masa kerja THL harus dibatasi. Sebenarnya penyebab belanja pegawai tinggi salah satunya adalah kebijakan Pemerintah Pusat dengan adanya rekrutmen P3K dan juga PNS. Selain itu, perampingan organisasi juga dapat menjadi alternative untuk menekan Belanja Pegawai.

- Bapak Murdjito :

Pos PAD yang paling besar terdapat di Pendapatan lain-lain. Sedangkan Retribusi daerah hanya 8,7% dari total Pendapatan. Bahkan untuk tahun 2022 dan 2023 nilai retribusi tidak ada kenaikan sama sekali. Hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Daerah agar lebih berupaya dalam meningkatkan Pendapatan.

- Bapak Ikhsan :

Tahun ini agar dapat memfokuskan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Sehingga dapat mengurangi defisit yang ada

- Bapak Farid:

Sebenarnya efisiensi tidak hanya harus pada belanja pegawai, namun bisa dari belanja barang dan jasa sehingga bisa digunakan sebagai belanja modal. Akan tetapi jika keadaan APBD kondisi setiap belanjanya sudah minimalis, maka strategi yang lain adalah peningkatan PAD terutama dengan melakukan focus pembangunan pada optimalisasi pariwisata.

- Bapak Latif :

Jika kondisi belanja di postur APBD sudah tidak bisa dilakukan efisiensi lagi karna sudah minimalis, maka kebijakan untuk peningkatan PAD melalui Pariwisata dapatnya disegerakan, sesuai dengan rekomendasi TPPD tahun 2020. Seolah rekomendasi dari TPPD tidak menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Cara meningkatkan PAD yang dapat kita lakukan lebih awal adalah memperbaiki data sumber-sumber pendapatan yang ada. Dengan data-data yang tersedia kita bisa menentukan kebijakan yang tepat terhadap strategi peningkatan PAD. Karena data saat ini merupakan hal yang sangat penting dalam pengambil kebijakan. Untuk mengurangi asumsi negative masyarakat terhadap APBD yang kurang proposional maka kita bisa mendorong OPD melakukan inovasi dalam mengelola anggaran yang ada.

- Bapak Ismet dari Bapenda :

Standart Menteri Dalam Negeri terhadap Kenaikan Pendapatan daerah senilai 4% setiap tahun. Kabupaten Bangkalan rata-rata naik sekitar 8% per tahun. Untuk sektor peningkatan PAD yang strategis melalui Pariwisata dengan menggandeng investor yang ada. Saat ini pariwisata dikelola oleh BUMDes sehingga tidak ada investor yang masuk. Dengan kondisi seperti ini, Pendapatan Daerah pun juga

sulit untuk ditingkatkan. Selain pariwisata Upaya peningkatan PAD melalui Pendataan ulang Objek Pajak PBB. Sedangkan pajak restoran dan hotel di masa pandemic ini memang sangat menurun. Rencana untuk memasang alat parkir elektronik di tempat-tempat yang potensi tinggi terkendala dengan efisiensi anggaran karena pandemic covid.

- Bapak Eko Setiawan:

Dapat disampaikan bahwa ada 2 kelompok belanja yaitu belanja pegawai sebesar 41,25% yang terdiri dari 16 item yang sifatnya mandatori. Dan beberapa belanja yang merupakan local wisdom, maka itulah yang bisa dilakukan evaluasi dalam efisiensi belanja pegawai, contohnya TPP, belanja penanggungjawab keuangan, belanja honor pengadaan barang dan jasa. Namun penentuan besaran honor yang diberikan pun sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari 943 belanja pegawai, 50% lebih adalah untuk gaji dan tunjangan ASN, belum lagi tunjangan profesi guru yang sifatnya mandatory yang merupakan penerimaan lewat (diterima langsung dibelanjakan, DAK non fisik). Tambahan penghasilan guru juga memperbesar beban belanja pegawai. Tambahan penghasilan PNS pun sudah melalui verifikasi kemendagri, jadi sudah sesuai dengan azas kepatutan, kewajaran dan kelayakan. Kontribusi TPP hanya 7,58%. Belanja BLUD di RSUD di gunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang ada di Rumah Sakit. Dari Belanja BOS terdapat unsur belanja pegawai sesuai aturan. Hak Keuangan DPRD kontribusinya 3,27% terdiri dari gaji DRD, tunjangan perumahan dan sebagainya. Gaji dan tunjangan P3K, kontribusinya sebesar 2,42% untuk 639 orang. Iuran askes PNS kita sediakan 17 M dari target sebesar 26 M kontribusinya hanya 1,8%. APBD 2021 yang sebesar 2,3 T pada bulan Februari 2021 ada pemberitahuan dari pemerintah pusat tentang pengurangan DAUM sebesar 4% atau 30,25 M maka kita lakukan refocusing pertama. Selanjutnya ada kebijakan refocusing kedua terkait penanganan covid sebesar 74 M. Jika kesemuanya itu dibebankan pada PD, maka PD tidak akan ada kegiatan. Maka kami lakukan pengakuan terhadap beberapa kegiatan PD yang mengarah pada 3 kegiatan, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan covid dan jaring pengaman sosial.

- Bapak Waki :

Di perubahan APBD masih ada kemungkinan pergerakan dari belanja pegawai, mengingat adanya pegawai yang pensiun, meninggal dan sebagainya karena penentuan belanja pegawai pada APBD saat ini masih berdasarkan besaran belanja pegawai pada bulan Oktober Tahun 2020. Di tahun 2022 beban belanja pegawai kita akan semakin berat karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat 850 P3K Guru. Yang kedua adanya rencana pengangkatan 150 sekian CPNS pada tahun 2021. Beban belanja pegawai yang besar salah satu penyebabnya adalah mandatory pemerintah pusat. Pada perubahan APBD 2021 bisa digunakan sebagai asumsi. Antara lain terdapat pengurangan DAUM sekitar 30M, penyediaan penanganan covid sebesar 74M.

c. Kesimpulan dan Rekomendasi:

A. Mengurangi Belanja Pegawai

1. Mengurangi Belanja Pegawai sesuai dengan mandatori dari Pemerintah Pusat.
2. Perlu dilakukan perampingan organisasi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya perampingan, membuat adanya pengurangan jabatan struktural sehingga belanja pegawai dapat lebih dikurangi.
3. Perlu adanya Peraturan Bupati untuk mengatur masa kerja THL dan Pegawai Kontrak.
4. Menetapkan umur pensiun tenaga honorer pada usia 56 tahun.
5. Meminimalisir dan mengurangi tenaga kontrak yang ada di Pemkab Bangkalan sehingga Belanja daerah terutama Pegawai dan Barang & Jasa bisa lebih rendah.

B. Peningkatan Belanja Modal

1. Perlu adanya Peningkatan sumber Pendapatan Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan APBD 2021, maka perlu dilakukan kebijakan responsif agar Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang sah dapat lebih ditingkatkan.
2. Potensi daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Potensi utama adalah sektor pariwisata dan menggali potensi-potensi baru. Adapun potensi yang dimaksud harus sesuai dengan tata ruang Pemerintah Daerah.
3. Perlu dilakukan pemberdayaan aset daerah yang sudah ada sehingga dapat lebih optimal.
4. Perlu adanya forum investasi di Kabupaten Bangkalan untuk mendorong Investor dari luar dan dalam daerah agar ikut membangun dan menambahkan potensi dan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Bangkalan.

6. Penutup dan Doa

Rapat ditutup oleh Bapak Wakil Bupati.

Bangkalan, 28 Mei 2021

Notulis



Drs. Ronny Sofiandri, M.Si

15. PERJALANAN DINAS KE KAWASAN EKONOMI KENDAL

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. Dasar : 1. Surat Bupati Bangkalan Tanggal 6 Desember 2021, Nomor: 050/3696/433.201/2021
2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, tanggal 9 Desember 2021 Nomor: 050/0621/Baperlitbang
3. Surat Perintah Tugas Wakil Bupati Bangkalan Tanggal 13 Desember 2021, Nomor: 094/369/433.031/2021
- II. Maksud Tujuan : Untuk melakukan study banding tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus bertempat di Ruang Ngesti Widdhi Setda Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : Hari Rabu-Kamis, 15-16 Desember 2021
- IV. Nama Petugas :
- | | |
|----------|---|
| Nama | : Dr. Bambang Haryadi, SE, Msi, AK, CA, CfrA |
| NIP | : - |
| Golongan | : - |
| Jabatan | : Sekretaris Bid. Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat TPPD Kab. Bangkalan |
| | |
| Nama | : Dr. Akhmad Farid, S.Pi, MT |
| NIP | : - |
| Golongan | : - |
| Jabatan | : Sekretaris Bid. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Penciptaan Lapangan Kerja TPPD Kab. Bangkalan |
| | |
| Nama | : Machmud Fauzi, SH |
| NIP | : - |
| Golongan | : - |
| Jabatan | : Anggota TPPD Kab. Bangkalan |
| | |
| Nama | : Drs. Moh. Kamil, M.Pd |
| NIP | : - |
| Golongan | : - |
| Jabatan | : Anggota TPPD Kab. Bangkalan |
| | |
| Nama | : Dr. (c). M. Latif, S. Kom, MT |
| NIP | : - |
| Golongan | : - |
| Jabatan | : Anggota TPPD Kab. Bangkalan |
- V. Daerah Tujuan : Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
- VI. Hadir Dalam Pertemuan :
1. Plt. Kepala Baperlitbang beserta tim Kabupaten Kendal
 2. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kendal
 3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kendal
 4. *Head Corporate* PT. Kawasan Industri Kendal
 5. Rombongan Studi Banding Kabupaten Bangkalan
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan
 7. Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan
 8. Kabid Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan
 9. Kabid Dinas PMPTSP Kabupaten Bangkalan
 10. Kabid Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan
 11. Tim Bappeda Kabupaten Bangkalan
- VII. Petunjuk Arahan yang diberikan :
- I. Sambutan Bupati Kabupaten Kendal dibacakan oleh Plt Kepala Baperlitbang
 - Kabupaten Kendal memiliki lokasi wilayah yang strategis pada jalur utama bagian utara, dekat dengan Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas dan dilewati Tol TransJawa, Jalur Pantura,

serta Jalur Kereta Api Ganda Jakarta-Semarang-Surabaya.

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mulai aktif dikembangkan dan berjalan pada tahun 2021. Pengembangan dimulai dengan menyiapkan kawasan strategis ekonomi Jawa Tengah agar terintegrasi dengan Pelabuhan Kendal. Adapun pembangunan pelabuhan Kendal sebelumnya dimulai pada tahun 2001-2007, dan pengembangan KEK sendiri dimulai sejak 2006-2011, hingga masuk dalam Proyek Strategis Nasional pada tahun 2016. Harapan dibangunnya proyek KEK ini adalah untuk memajukan Ekonomi Masyarakat dengan mengacu pada Permendagri 25 tahun 2019.
- Jumlah *tenant* saat ini sebanyak 69 pelaku usaha, dengan 13 *tenant* yang masih dalam tahap konstruksi.

II. Sambutan Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan

- Banyak kesamaan antara Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Kendal, diantaranya sama-sama kabupaten kecil, memiliki wilayah laut dan sebagian besar di wilayah pesisir, dan luas wilayah dan kondisi ekonomi yang hampir sama, serta adanya wisata religi dan kuliner yang tidak jauh berbeda.
- Kabupaten Bangkalan memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan KKM (Kawasan Khusus Madura) dengan memanfaatkan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan serta memberikan akses jalan lintas ke Kecamatan Modung sebagai area dari konstruksi KKM.
- Dengan alasan tersebut, Kabupaten Bangkalan ingin mempelajari kiat dari Kabupaten Kendal dalam pembangunan KEK ini.

III. Paparan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Baperlitbang (Ibu Indraswari)

- Kronologis KEK dimulai tahun 2001 dengan melakukan penyiapan Kawasan Strategis Ekonomi Jawa Tengah. Tahun 2001-2007 dilakukan pembangunan Pelabuhan Kendal. Tahun 2006-2011 menyiapkan KEK Kendal. Tahun 2007-2011 RUTR Kabupaten Kendal dan RTRW Provinsi Jateng. Tahun 2005-2012 mulai dilakukan penawaran kepada investor oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat kepada Jababeka. Tahun 2012 Jababeka menggandeng Sembcorp Singapore (JV) berbentuk Kawasan Industri Kendal (KIK). Tahun 2013 Ra-Masterplan, mulai pembebasan lahan, perizinan dan AMDAL. Tahun 2016 KIK masuk dalam PSN (Perpres 3/2016), operasional diresmikan oleh Presiden RI dan PM Singapore. Jumlah investor saat peresmian sebanyak 18 *tenant* dari 6 negara. Tahun 2017 KIK masuk dalam PSN (Perpres 58/2017) dan investor sebanyak 32 *tenant* dari 6 negara. Tahun 2018 pengusulan kembali memperoleh fasilitas KEK.
- Dasar hukum KEK yaitu Keppres No. 10 tahun 2020 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah, PP nomor 85 tahun 2019 tentang KEK Kendal, Keputusan Bupati Kendal nomor 530/72/2020, dan Keputusan Bupati Kendal nomor 500/148/2020.
- PT. KIK sebagai badan usaha pembangun dan pengelola KEK. Luas KEK yaitu 1000 Ha dengan kegiatan utama yaitu industri tekstil dan busana, industri *furniture* dan alat permainan, industri

makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, dan logistik.

- Infrastruktur prioritas yaitu pelabuhan kendal, harbour toll Semarang-Kendal, Gardu Induk PLN di KIK, Bendung Bodri, Bendung Sungai Blorong, dan pipa gas Smg-Kendal.

IV. *Head Corporate* PT. KIK, Ibu Luki

- Saham dari KIK dimiliki PT. Jababeka TBK sebanyak 51% dan 49% dimiliki oleh Sembcorp (BUMN Singapura). Dimana proyek ini merupakan salah satu kerjasama 2 negara antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 2014-2019.
- Tahap 1 *master planning* meliputi luasan 1000 Ha. Tahap 2 yaitu 1200 Ha.
- Tahun 2017 Jokowi dan Perdana Menteri Singapura sepakat mendirikan sekolah vokasi untuk menyediakan SDM di dalam kawasan industri Kendal.
- Terdapat 6 sektor industri yang ada di KEK, meliputi industri makanan, *furniture*, tekstil dan busana, otomotif, elektronik, dan logistik.
- Terdapat 69 industri yang telah beroperasi dan 13 industri dalam tahap pembangunan pada November 2021. Menyerap tenaga kerja sebanyak 11.380 orang. Investor telah menanamkan modal mencapai 22,4 T Rupiah dengan target tahun 2021-2025 yaitu 25 T Rupiah.
- Syarat untuk investor yang ingin masuk yaitu harus berorientasi ekspor, bersubstitusi impor, dan industri *high teck*.
- Investor di KEK merupakan pelaku usaha yang baru masuk di Indonesia sehingga dilakukan pendampingan mulai dari tahap mencari tenaga kerja, proses perizinan, tempat tinggal dan lainnya.
- Status KIK ada 2, yaitu sebagai proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus.
- Peran KIK fokus untuk pembangunan di dalam kawasan, sedangkan peran pemerintah fokus pada penyediaan prasarana seperti pelabuhan dan jalan tol yang mendukung industri.
- Adapun Target untuk PT. KIK dalam Pengembangan KEK ini diantaranya adalah, untuk meningkatkan Ekspor sebesar USD 25 M per tahun, mengurangi Import, Menambahkan 15.000 Tenaga Kerja, serta menaikkan PAD Kabupaten Kendal.

V. Diskusi dan Tanya Jawab

1. Dr. Bambang Haryadi, SE, Msi, AK, CA, CfrA:

Pertanyaan :

- a) Bagaimana ide awal pengadaan kawasan, serta keterlibatan pemerintah daerah untuk mengawali?
- b) Apakah ada efek secara langsung terhadap PAD Kabupaten Kendal?
- c) Bagaimana cara meyakinkan investor untuk pertama kali?

Jawaban :

- a. Dijawab oleh Plt Kepala Baperlitbang Kab. Kendal, Bapak Abdul Wahab.
 - Ide awal bermula karena Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang sudah *overload*, sehingga pada tahun 2007 mulai dilakukan pengembangan Pelabuhan Kendal.

Namun, karena Pemkab tidak dapat bekerja sendiri, maka kami bekerjasama dengan PT. Jababeka yang sekarang menjadi PT. KIK untuk melakukan Pembangunan KEK.

- Efek Langsung terhadap PAD hanya dari pajak-pajak yang berlaku. Selain itu akan diadakan *tax-holiday* dengan memanfaatkan UMKM.
 - Meyakinkan investor dengan cara memberikan kemudahan untuk melakukan investasi di Dinas PMPTSP dengan cara digital dan investor harus masuk dengan mudah.
- b. Dijawab oleh Kepala Bagian Hukum Kab. Kendal, Bapak Fuad.
- Ide awal dari Pemkab, namun untuk melaksanakannya sulit baik dari sisi pembangunan dan regulasi. Tahun 2013, PT. Jababeka datang untuk mengajukan izin lokasi seluas 1.000 ha. Sehingga yang menjadi badan usaha adalah PT. KIK dan administrator dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kab. Kendal.
- c. Dijawab oleh Kepala Dinas PMTPSP Kab. Kendal, bapak Andi.
- Terkait PAD yang masuk ke Kabupaten Kendal diantaranya adalah pajak Penerangan dan Genset, Pajak Air, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak BPHTB.

2. Abdul Azis, Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan,

Pertanyaan :

Kondisi Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Kendal memiliki kesamaan hampir di setiap hal mulai dari kondisi wilayah, potensi daerah, serta PAD. Bagaimana kondisi UMK di Kab Kendal? Dan bagaimana strategi pemindahan industri agar masuk ke Kendal?

Jawaban :

- a. Dijawab oleh Plt Kepala Baperlitbang Kab. Kendal, Bapak Abdul Wahab.
- UMK di Kab. Kendal sekita 2,3 juta, sehingga kondisi ini tidak berbeda jauh dari bangkalan. Adapun terkait pengajuan, pengembangan, dan pengelolaan KEK dilakukan sepenuhnya oleh PT. KIK.
- b. Dijawab oleh Kepala Bagian Hukum Kab. Kendal, Bapak Fuad.
- Strategi yang dilakukan Kab. Kendal tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri. Perlu ada dorongan dari Pemprov dan Pusat. Mulai dari inisiatif dan realisasi sepenuhnya dilaksanakan PT. KIK ke Pemprov dan Pusat. Terkait regulasi dan strategi dari Pemkab

untuk mengajukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilihat pada PP Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Drs. Moh. Kamil, M.Pd, Anggota TPPD

Pertanyaan :

Bagaimana keterlibatan tenaga kerja lokal dalam KEK dan sejauh mana peran tenaga kerja asing yang terlibat?

Jawaban :

Dijawab oleh *Head Corporate* PT. KIK, ibu Luki. Tenaga kerja merupakan salah satu hal yang harus diyakinkan oleh PT. KIK kepada investor asing agar mau menanamkan modal, selain PPH, PPN, dan Infrastruktur. Sebagian besar investor asing melakukan survei lokasi untuk melihat kondisi SDM baik secara kualitas dan kuantitas. Selain itu, PT. KIK juga melakukan MoU dengan Gubernur Jawa Tengah untuk memanfaatkan SDM lokal melalui SMK yang ada agar bisa bekerjasama untuk penyediaan SDM. Selanjutnya diharapkan agar MoU ini berlanjut ke tahap Universitas.

- VIII. Hasil :
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kendal melalui proses Pengembangan yang cukup panjang mulai dari Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Kendal hingga menjadi KEK seperti saat ini.
 2. Kabupaten Kendal dan Kabupaten Bangkalan memiliki banyak kesamaan baik dari sisi kondisi wilayah, ekonomi, dan SDM. Sehingga tidak sulit mencari kesamaan yang ada dari kedua daerah ini.
 3. Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan hampir mirip dengan Pembangunan Pelabuhan Kendal, sehingga dalam mewujudkan Kawasan Khusus Madura (KKM) dapat dilakukan peninjauan oleh Pemkab Bangkalan agar dapat berkembang seperti KEK Kab. Kendal.
- IX. Saran / Tindakan :
1. Acara *Study Banding* dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kendal.
 2. Hasil dari Perjalanan Dinas ini akan dijadikan laporan kepada Bupati Bangkalan.

X. Lain – Lain : -

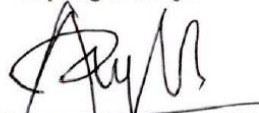
Bangkalan, 17 Desember 2021
Pelapor

Sekretaris Bid. Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat



Dr. Bambang Haryadi, SE, Msi, AK, CA, CfrA

Sekretaris Bid. Percepatan Pengentasan
Kemiskinan dan Penciptaan
Lapangan Kerja



Dr. Akhmad Fandi, S.Pi, MT

16. FOTO/DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Rapat Koordinasi TPPD



Gambar 2. Rapat Koordinasi TPPD



Gambar 3. Rapat Koordinasi TPPD



Gambar 4. Rapat Koordinasi TPPD



Gambar 5. Rapat Pembahasan TPPD



Gambar 6. Rapat Pembahasan TPPD



Gambar 7. Rapat Pembahasan TPPD



Gambar 8. Rapat Pembahasan TPPD



Gambar 9. Study banding Guru ngaji ke Pasuruan



Gambar 10. Study banding Guru ngaji ke Pasuruan



Gambar 11. Study banding kawasan ekonomi khusus di Kab Kendal



Gambar 12. Study banding kawasan ekonomi khusus di Kab Kendal



Gambar 13. Study banding ke Kab Kendal



Gambar 14. Study banding ke Kab Kendal